

*PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA
DI TENGAH ARUS PERUBAHAN POLITIK
DI JAWA TIMUR TAHUN 1990-2004*

SUATU TINJAUAN ANTROPOLOGI POLITIK

Edisi Revisi

Oleh :

Martinus Legowo

M. Arif Affandi

M. Jacky

Sri Mastuti Purwaningsih

FX Sri Sadewo

Editor:

Martinus Legowo



Penerbit

Unesa University Press

***PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA
DI TENGAH ARUS PERUBAHAN POLITIK
DI JAWA TIMUR TAHUN 1990-2004***

SUATU TINJAUAN ANTROPOLOGI POLITIK

Edisi Revisi

Diterbitkan Oleh

UNESA UNIVERSITY PRESS

Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015

Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15 Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109

Fax. 031 – 8288598

Email : unipress@unesa.ac.id

viii, 106 hal., Illus, 16 x 23

ISBN: 978-602-449-439-1

copyright © 2018 Unesa University Press

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit

PENGANTAR

Di dalam kasanah ilmu antropologi politik, tidak terlalu banyak yang berbicara tentang partisipasi politik kelompok minoritas. Terima kasih kepada Tuban, penulis diberi kesempatan menambah referensi tentang hal tersebut. Buku ini diberi judul Partisipasi Politik Etnis Tionghoa di Tengah Arus Perubahan Politik (Suatu Tinjauan Antropologi).

Dalam buku ini mengulas atau menggambarkan bagaimana partisipasi golongan keturunan (Cina) Tionghoa dalam per-caturan politik di Indonesia. Hal ini terlibat ketika terjadi krisis moneter tahun 1997-1998 telah mengakibatkan sebuah perubahan kepemimpinan nasional di Indonesia, pemerintahan Subarto jatuh pada tanggal 20 Mei 1998. Perubahan kepemimpinan nasional ini menandai era Reformasi. Perubahan sistem politik ini memberikan ruang berekspresi bagi etnis Tionghoa. Aspek yang diekspresikan antara lain adalah sosial-budaya hingga politik. Bagi mereka, ada sejumlah aspek yang menjadi fokusnya, yaitu kepentingan bisnis/usaha, HAM, pluralisme dan pengakuan terhadap minoritas, serta isu agama dan budaya.

Bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh etnis Tionghoa ada yang sifatnya langsung dan formal, ikut terlibat menjadi calon legislatif dan terdaftar sebagai anggota pada pengurusan partai politik. Ada pula yang sifatnya tidak langsung dan cenderung informal dipengaruhi pertimbangan agama dan budaya.

Dalam buku ini juga terpetakan kategori eksistensi etnis Tionghoa berdasarkan wilayah dan sub etnis, yaitu : (1) daerah pesisiran sub-etnis Jawa (Arek) dari sisi ekonomi mendominasi, memiliki hubungan baik dengan penguasa dan etnis lokal, partisipasi politik tinggi, cenderung pragmatis dan berafiliasi pada partai nasionalis, potensi konflik rendah, (2) daerah pesisiran sub-etnis Pedalungan dari sisi ekonomi mendominasi, hubungan kurang baik dengan penguasa dan etnis lokal, partisipasi politik tinggi, cenderung pragmatis, berafiliasi dengan partai nasionalis, potensi konflik manifest, (3) daerah pedalaman sub-etnis Jawa (Arek) mendominasi dari sisi ekonomi, hubungan dengan penguasa dan tokoh agama baik, partisipasi politik tinggi, idealis dalam pilihan politik dengan mempertimbangkan isu HAM, pluralisme, agama dan budaya, serta lebih variatif dalam pilihan politik, potensi konflik agama laten, dan (4) daerah pedalaman sub-etnis Jawa (Mataraman) mendominasi dari sisi ekonomi, hubungan baik dengan penguasa, partisipasi politik tidak langsung, cenderung pragmatis dan berafiliasi pada partai nasionalis, potensi ekonomi tinggi.

Buku ini merupakan hasil penelitian selama dua tahun yang didanai oleh Simlitabmas Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam skim penelitian dasar (fundamental). Oleh karena itu, tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada institusi tersebut.

Surabaya, 1 Januari 2013

PENGANTAR

(Edisi Revisi)

Setelah dicermati pada cetakan ke-1, ada sejumlah kekurangan dalam buku ini. Pertama, ada tata letak bab yang kurang tepat, khususnya antara bab V dan VI. Apabila dibaca secara jeli, maka menimbulkan kesan melompat. Hal itu bisa dipahami karena bab V merupakan analisis dari bab VI, sehingga posisinya seharusnya berada sesudah bab VI. Faktor ketergesaan dan kejelian berpengaruh pada kualitas buku, termasuk pada buku ini. Selain itu, dengan tata letak tersebut, seolah-olah buku ini diakhiri dengan mengambang.

Kedua, setelah direview, tim penulis tidak memaparkan lebih tajam tentang kerangka konsep (bagan 1). Kerangka konsep ini sangat penting untuk membaca alur temuan dan analisis dari temuan tersebut. Di dalam bagan itu, tim penulis mencoba menggambarkan bagaimana relasi antara negara dan komunitas-komunitasnya. Selain itu, bagan ini juga menjelaskan relasi antara komunitas pendatang dan komunitas “asli” atau dikenal dengan pribumi. Pengelolaan negara atas komunitas-komunitas berpengaruh pada relasi mereka. Disadari atau tidak, masing-masing komunitas akan membentuk emosi orang kita dan orang mereka. Pada gilirannya, di situasi yang kurang menguntungkan sentimen orang kita dan orang mereka menjadi benturan berdarah.

Sebagaimana lazimnya, pada cetakan pertama, buku tidak diakhiri dengan penutup. Pada edisi revisi, buku diakhiri dengan bab penutup. Demikian hasil revisi dilakukan, semata-mata untuk meningkatkan kualitas buku.

Surabaya, 1 Juni 2020

DAFTAR ISI

<i>PENGANTAR</i>	<i>iii</i>
<i>PENGANTAR (Edisi Revisi)</i>	<i>v</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>vii</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
<i>Problematika Etnisitas di tengah Krisis Moneter 1990-an ...</i>	<i>1</i>
<i>Partisipasi Politik Minoritas dalam bingkai Teoritis</i>	<i>3</i>
<i>BAB II PENERIMAAN “SETENGAH HATI” DARI MASA KE MASA</i>	<i>11</i>
<i>BAB III MASYARAKAT TIONGHOA DALAM LINGKARAN SOSIAL EKONOMI BUDAYA YANG BERBEDA</i>	<i>21</i>
<i>Kota Surabaya: Rumah Minimalis bagi semua Etnis</i>	<i>21</i>
<i>Kabupaten Tuban: Daerah Pesisiran yang Menjadi Tempat Singgah Para Pedagang</i>	<i>30</i>
<i>Kabupaten Situbondo: Rumah Orang Pendalungan yang Penuh Dinamika</i>	<i>34</i>
<i>Kota Malang: Kota Lama yang lahir kembali dengan wajah Baru</i>	<i>39</i>
<i>Kota Madiun: Kota Jawa Mataraman yang bergerak menjadi Masyarakat Industri</i>	<i>50</i>

<i>BAB IV ETNIS TIONGHOA DALAM LINGKARAN POLITIK</i>	57
<i>Menghindari Politik untuk menggapai Keuntungan Ekonomi (Kasus di Surabaya)</i>	57
<i>Berharap dapat berpartisipasi politik di Tengah Iklim Politik yang Berubah (Kasus Tuban)</i>	63
<i>Berpartisipasi sebagai bentuk kesembuhan dari pengalaman buruk (Kasus Situbondo)</i>	69
<i>Memilih Partai Politik, Merindukan Tokoh Nasionalis dan Pluralis (Kasus di Malang)</i>	72
<i>Berpartisipasi mengikuti Masa Lalu (Kota Madiun)</i>	80
<i>BAB V PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA: KOMPARASI LIMA KOTA BESAR</i>	83
<i>Mempertabankan Eksistensi Ekonomi</i>	83
<i>Strategi Adaptif: Agar tetap Selamat di Lingkungan Politik yang Berubah</i>	86
<i>Isu dan Nilai-nilai Yang Diperjuangkan di Arena Reformasi</i>	89
<i>BAB VI PENUTUP: PARTISIPASI POLITIK DI TENGAHTENGAH KEBERAGAMAN BUDAYA JAWA TIMUR</i>	93
<i>Kategori pertama, daerah pesisiran sub-etnis Jawa (Arek)</i>	98
<i>Kategori kedua, daerah pesisiran sub-etnis Pendalungan</i>	98
<i>Kategori ketiga, daerah pedalaman sub-etnis Jawa (Arek)</i>	99
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	101

BAB I

PENDAHULUAN

Problematika Etnisitas di tengah Krisis Moneter 1990-an

Krisis moneter tahun 1997-1998 telah berakibat pada perubahan kepemimpinan nasional di Indonesia, pemerintahan Suharto jatuh pada tanggal 20 Mei 1998. Perubahan ke-pemimpinan nasional ini menandai era reformasi. Salah satunya adalah reformasi politik. Di dalam reformasi politik, kebijakan depolitisasi dan sentralistik pada masa pemerintahan Suharto dihapus. Tidak ada penerapan asas tunggal pada organisasi sosial-politik, sehingga pendirian organisasi sosial-politik menjadi bervariasi, mulai secara eksplisit berbasis agama, ideologi hingga etnis tertentu. Selain itu, sistem politik pun berubah, dimulai dari sistem pemilu hingga kelembagaan.

Perubahan sistem politik ini memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan semasa pemerintahan Suharto

akibat dari kebijakan politiknya, demikian pula pada masyarakat Tionghoa. Meski dari catatan Richard Robinson (1986) dan Michael R. J. Vatikiotis (1994) tidak terpinggirkan dan bahkan diuntungkan secara ekonomi, masyarakat Tionghoa mengalami marjinalisasi secara sosial, politik dan kebudayaan (Dananjaya, 2003). Perubahan sistem ini kemudian berakibat pada pertumbuhan organisasi sosial, kebudayaan dan politik pada masyarakat Tionghoa yang pesat, menjadi 156 organisasi kemasyarakatan pada tahun 2006 dan sebelumnya terdapat setidaknya-tidaknya 3 (tiga) partai politik dengan basis etnis Tionghoa. Penguatan organisasi kemasyarakatan ini sebenarnya merupakan bagian dari penguatan masyarakat madani yang tumbuh sejak tahun 1990-an dan mencapai puncak pada masa reformasi sebagai masa transisi menuju demokratis.

Artinya, proses peminggiran sosial, politik dan kebudayaan pada masyarakat Tionghoa yang kemudian diikuti oleh peningkatan sentimen anti-etnis (*xenophobia*) tersebut tidak serta merta mengurangi kemampuan dalam partisipasi politiknya. Partisipasi politik ini tidak bisa dilepaskan dari pendidikan politik pada etnis tersebut setidaknya-tidaknya selama pemerintahan Suharto. Selain itu, penguatan partisipasi ini juga tidak lepas dari aspirasi politik dan isu-isu politik, serta kemampuan akses politik pada masa akhir pemerintahan Suharto. Di tingkat pusat, aspirasi politiknya telah jelas, yaitu perubahan produk perundang-undangan yang dapat mengurangi atau meniadakan marjinalisasinya. Namun, menjadi pertanyaan pada partisipasi politik dan aspirasi politik di tingkat lokal. Hal itu menjadi penting karena peningkatan sentimen anti-etnis akibat kebijakan yang meminggirkan etnis tersebut lebih terjadi pada tataran tingkat lokal daripada di pusat. Buku ini membahas bagaimana partisipasi politik, pendidikan politik, aspirasi dan isu-isu politik, serta

perubahan akses-politik masyarakat etnis Tionghoa selama masa transisi menuju demokrasi (1990-2004).

Partisipasi Politik Minoritas dalam bingkai Teoritis

Oleh karenanya, sebelum membahas tentang partisipasi politik kelompok minoritas, hal itu perlu mengaitkan antara partisipasi politik dan demokrasi. Dalam demokrasi, adanya jaminan bagi kelompok-kelompok minoritas bahwa hak dan kepentingannya juga masuk dalam agenda kebijakan publik. Di sejumlah kasus di dunia, terdapat kecenderungan bahwa transisi demokrasi kerap meninggalkan bahkan mengeksklusi kelompok-kelompok minoritas dari panggung politik. Beberapa contoh di antaranya: kelompok suku Maya di Guetamala, Suku Moro di Philipina, dan Etnik Rohingya di Myanmar.

Meskipun ada kesulitan untuk mendapatkan definisi yang dapat diterima secara universal, berbagai ciri khas kaum minoritas telah diidentifikasi, yang jika disatukan telah mencakup hampir semua situasi dari kaum minoritas. Uraian tentang kaum minoritas yang paling sering digunakan dalam suatu Negara, dapat disimpulkan sebagai kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, sukubangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Di samping itu, terungkap pula pilihan lain, yakni penggunaan perumusan diri-sendiri (*self-definition*) berupa "suatu keinginan dari anggota kelompok yang bersangkutan untuk melestarikan ciri khas mereka," dan untuk diterima sebagai bagian dari kelompok itu oleh anggota-anggota lain, yang digabungkan dengan persyaratan obyektif tertentu (PUSHAM UII, 1998)

Terminologi ini merujuk pada kelompok etnis, agama dan bahasa yang memiliki keterbatasan jumlah dalam sebuah

lingkup masyarakat yang cenderung homogen. Dalam posisi tersebut, kelompok minoritas seringkali berada di area pinggiran, sehingga kerap tidak terwadahi dalam bingkai kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Kebanyakan dari mereka memiliki keterbatasan akses politik, mengalami diskriminasi, pelanggaran HAM, akses yang terbatas dalam pelayanan publik dan berada di bawah garis standar kesejahteraan sosial.

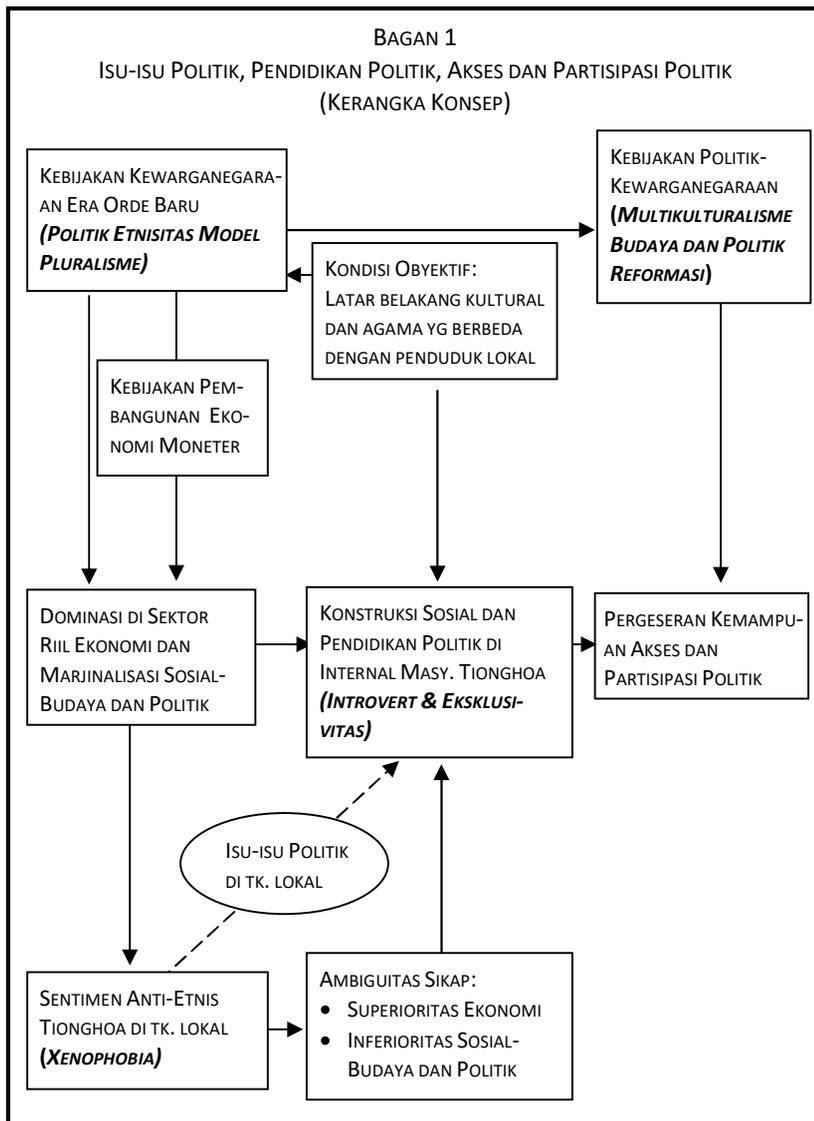
Pentingnya partisipasi politik dalam masyarakat berkaitan dengan pembangunan (*social development*), Daniel Lerner (1983: 48-49) secara eksplisit menunjuk pada faktor partisipasi politik sebagai salah satu indikator dari modernisasi. Menurutnya, partisipasi ini merupakan rangkaian dari faktor-faktor sebelumnya, seperti tingkat urbanisasi, melek huruf dan partisipasi media. Secara sederhana, bila warga dapat membaca dan menulis, membeli kontan, maka semakin besar menjadi seorang pemilih.

Meskipun demikian, David E. Apter (1996: 318) memberikan catatan bahwa tidak semua warganegara mampu merumuskan pilihan mereka, memberikan informasi baik kepada warganegara lain dan pemerintah mengenai pilihan-pilihan tersebut. Lebih dari itu, ketimpangan sosial ini sering menghambat pelaksanaan hak-hak dan pemakaian kesempatan institusional mereka dalam kehidupan nyata. Hal ini juga memperkuat pendapat Lipset bahwa demokrasi yang stabil ditentukan oleh tingkat ekonomi. Semakin sejahtera suatu bangsa makin besar peluang mempertahankan demokrasi, di dalamnya massa rakyat dengan cerdas berperan serta dalam politik dan mengembangkan pengendalian diri untuk tidak terseret oleh seruan-seruan demagog yang tidak bertanggung jawab (Maliki, 2000: 106-107), demikian juga menjadi catatan dari Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1996).

Hal ini bisa dipahami dengan bahwa proses pendidikan politik itu terjadi secara kontinu berdasarkan pengalaman sosialnya, dimulai dari keluarga dengan penciptaan imej tentang partai politik dan proses politik hingga informasi yang diperoleh dari komunikasi politik. Penciptaan imej tentang politik ini bergantung pada peristiwa politik yang berlangsung. Menurut Collin McAndrew dalam penelitian menunjukkan bahwa kedua hal tersebut berpengaruh sikap pemilih terhadap sistem politik. Oleh karenanya, David Easton dan Jack Dannis (1969) mendefinisikan pendidikan politik sebagai proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya.

Lebih lanjut, menurut David Easton dan Jack Dannis (1969), selain lebih banyak dipengaruhi oleh keluarganya, mekanisme pendidikan politiknya melalui imitasi, instruksi dan motivasi. Hal ini berbeda dengan orang dewasa di mana pendidikan politiknya lebih dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kerja dan media massa. Di dalam prosesnya, ada empat tahap pendidikan politik pada anak-anak dan remaja, yaitu: (1) pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua, presiden dan tokoh-tokoh politik lainnya, (2) perkembangan perbedaan antara otoritas internal dan eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah, (3) pengenalan terhadap institusi-institusi politik yang impersonal, seperti anggota perwakilan rakyat, kabinet negara, Mahkamah Agung dan Pemilu, dan (4) perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi, sehingga gambaran diidealisasi terhadap pribadi khusus, seperti presiden dan dialihkan ke lembaga kepresidenan. Seks, IQ, agama, etnisitas dan status sosial ekonomi sangat berpengaruh dalam pendidikan politik

ini. Demikian pula, dalam perilaku politiknya individu dipengaruhi oleh kondisi sosialnya, seperti pengangguran, kelompok minoritas, kelompok agama, kewarganegaraan dan kemampuan menyerap fakta dan opini melalui media massa.



Selain pendidikan politik, perubahan sistem politik turut berpengaruh pada partisipasi politik. Pada kelompok minoritas, perubahan sistem politik ini akan memberi ruang atau sebaliknya mengabaikannya. Hasil kajian Susan A. Banducci dan Jeffrey A. Knap (2006) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa sistem pemilihan akan menentukan apakah kepentingan kelompok minoritas terakomodasi atau tidak. Pada sistem elektoral langsung, komposisi kelompok etnis mayoritas pada suatu distrik akan lebih diuntungkan. Kelompok minoritas akan terwakili pada distrik di mana mereka berada dalam posisi mayoritas. Di dalam sistem kepartaian, kepentingan dan rekrutmen pada kelompok minoritas terjadi bila mendirikan partai atau kelompok kepentingan minoritas. Hal itu dicermati juga oleh Claudine Gay (2001) di negara bagian California, Amerika Serikat.

Konsekuensi dari sistem politik yang tidak memberikan ruang pada kelompok minoritas dapat berpengaruh pada partisipasi politiknya. Penelitian Loretta E. Bass dan Lynne M. Casper (1999) menunjukkan bahwa orang-orang pendatang atau baru saja memperoleh kewarganegaraan sangat kurang dalam mendaftarkan dalam pemilu dan menggunakan hak pilihnya. Hal itu juga ditentukan oleh lama tinggal dan tingkat pendidikannya. Semakin lama tinggalnya dan tinggi tingkat pendidikannya, semakin tinggi kemungkinan mendaftarkan dan menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, Branton (2005) menunjukkan bahwa etnisitas dan posisi minoritas juga berpengaruh pada afiliasi politik, di Amerika Serikat kelompok-kelompok etnis minoritas lebih berafiliasi pada Partai Demokrat yang isu-isu politiknya seiring dengan kepentingannya.

Dalam konteks Indonesia, kesadaran akan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas menjadi agenda yang sangat

strategis. Tidak hanya karena faktor kemajemukan sosial, melainkan sebagai upaya untuk tetap menjaga kehidupan demokrasi serta membangun masyarakat yang damai (*peaceful society*). Pengabaian negara terhadap kelompok minoritas justru berpotensi menurunkan kohesivitas sosial. Hal ini dikarenakan dapat memunculkan serangan balik terhadap negara manakala kelompok minoritas justru semakin kental identifikasinya daripada identifikasi kebangsaan.

Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh negara adalah memberikan ruang-ruang dan akses politik yang sama terhadap seluruh warga negara melalui sistem politik terbuka (demokrasi). Sebagian kelompok minoritas memiliki pandangan bahwa perjuangan melalui jalur politik akan membawa dampak besar dalam aspek kehidupan yang lain (ekonomi dan budaya). Hal ini diperkuat dengan beberapa kasus konflik sosial antara etnis mayoritas dengan minoritas yang lebih banyak disebabkan karena penguasaan sektor-sektor ekonomi dan budaya oleh minoritas. Penguasaan di sektor ekonomi dan budaya kerap menjadi penyebab utama konflik antar etnis.

Namun pendekatan politik dengan sistem demokrasi perlu diberikan garis tebal, karena tidak semua sistem demokrasi menjadi solusi terhadap jaminan hak-hak minoritas secara utuh. Pada kasus demokrasi *majoritarian*, hak-hak politik minoritas kerap hanya menjadi jargon namun dalam implementasinya tergilas dengan kepentingan mayoritas. Dalam konsep ini menguat prinsip “kehendak mayoritas” adalah yang terbaik bagi masyarakat. Konsep yang lebih ramah bagi kepentingan minoritas adalah demokrasi pluralis.

Model demokrasi pluralis muncul untuk menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan dapat terus berlangsung

dan berjalan, sekalipun pada kenyataannya terdapat keterbatasan partisipasi dan kepentingan dalam masyarakat. Model ini berasal dari pandangan pluralisme yang menyatakan bahwa masyarakat modern seringkali terbentuk dari beberapa grup tertentu seperti ekonomi, keagamaan, etnis dan grup-grup budaya lainnya. Individu dengan kesamaan kepentingan akan membuat sebuah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini berusaha untuk mempengaruhi pembuat keputusan di pemerintahan. Model demokrasi pluralis menginterpretasikan pemerintahan “*dari rakyat*” yang berarti bahwa pemerintahan dari rakyat yang beroperasi melalui persaingan kelompok kepentingan. Singkat kata, model pluralis menekankan pada sebuah struktur pemerintahan yang memberikan kelompok kepentingan ini akses kepada masyarakat yang akan memberi mereka masukan dalam pengambilan keputusan. Tidak seperti majoritarian yang menghalangi partisipasi kaum minoritas, pluralis memberikan kesempatan pada kaum minoritas untuk bersuara melalui kelompok kepentingan.

Hal yang demikian nampaknya dialami oleh Indonesia (lihat bagan 1). Dengan kebijakan kewarganegaraan era Orde Baru, pemerintah mengembangkan strategi pluralisme, yaitu: mengedepankan kesatuan daripada persatuan dalam konsep *bhinneka tunggal ika*. Di dalam pemahaman kewarganegaraan ini, ada proses penyeragaman (*homogenisasi*). Untuk menghindari konflik antar kelompok etnis dan kelompok-kelompok lain, pemerintah menegakan aturan anti-SARA. Artinya, tidak boleh ada perbedaan, khususnya ketika berhadapan dengan kelompok mayoritas. Oleh karena itu, kelompok mayoritas lebih banyak menguasai birokrasi (dan politik pemerintahan) dalam kerangka mengatur relasi antar kelompok mayoritas dan minoritas. Namun demikian, karena ketidakmampuan dalam aspek eko-

nomi, kelompok mayoritas membiarkan kelompok minoritas, dalam hal ini etnis Tionghoa, untuk tetap menguasai sektor tersebut.

Mencermati kondisi yang demikian, kelompok etnis minoritas, khususnya etnis Tionghoa, merasa nyaman berkehidupan di sektor ekonomi. Kelompok etnis ini menghindari persoalan-persoalan politik dan birokrasi pemerintahan. Apabila harus berurusan, kelompok etnis ini lebih menyukai menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa merupakan orang yang berada di luar birokrasi dan politik pemerintahan, atau merupakan bagian dari kelembagaan tersebut. Namun demikian, penguasaan sektor ekonomi oleh kelompok minoritas dan sekaligus membuat ketergantungan kelompok mayoritas terhadap minoritas ini menimbulkan masalah baru. Kondisi ini tidak dengan serta merta diterima sebagai kondisi *given*. Kondisi ini memunculkan *xenophobia*, kebencian (rasialisme) terhadap kelompok minoritas.

Xenophobia dan ditambah dengan politik identitas, masyarakat etnis minoritas mengembangkan konstruksi sosial yang berbeda dengan kelompok mayoritas. Mereka juga mengembangkan sikap introvert (rendah diri) dan eksklusif. Hal ini semakin kuat mengingat mereka memiliki perbedaan secara kultural dan agama. Meskipun demikian, hal ini menjadi berubah ketika negara dalam posisi yang lemah. Politik kewarganegaraan tidak lagi politik pluralisme, tetapi bergeser ke politik multikulturalisme. Perubahan politik ini juga memberikan ruang bagi partisipasi politik kelompok minoritas.

BAB II

PENERIMAAN “SETENGAH HATI” DARI MASA KE MASA

Proses migrasi etnis Tionghoa telah terjadi sebelum abad ke-15 dalam rangkaian jalur perdagangan sutra (Sukadri, 1996; Tjandrasasmita, 2000) dan turut berperan dalam penyebaran agama Islam di Jawa (Kong, 2000). Pada abad ke-17 dan sesudahnya, perubahan politik dan bencana alam di dataran Cina menjadi faktor pendorong dan peluang kerja di perkebunan dan perdagangan di koloni VOC dan semasa pemerintahan kolonial Hindia Belanda menjadi faktor penarik dari proses migrasi dalam jumlah besar. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, komunitas Tionghoa, Arab dan orang *Timur Asing* lainnya tinggal dalam kampung-kampung dan tidak bisa bebas keluar-masuk, tetapi harus membawa surat jalan. Kebijakan segregasi etnik berakhir tahun 1910 dengan pencabutan *wijken en passen stelsel*. Pencabutan ini berakibat terjadi persaingan ekonomi antara pedagang pribumi dan Tionghoa, sehingga ter-

jadi konflik etnis tahun 1918 (Ong Hok Ham, *Jawa Pos*, 15/7/1998).

Berbeda dengan komunitas Arab yang memiliki kesamaan agama dengan penduduk bumi putera, dengan perbedaan budaya, agama dan persaingan ekonomi komunitas etnis Tionghoa sukar diterima, dan acapkali menjadi kurban dari perubahan politik di Nusantara. Lebih menyedihkan lagi, komunitas Tionghoa sering menjadi korban kekerasan dari pergolakan politik. Sebelum peristiwa 1918, Rickflefs (1991) mencatat bahwa pada tanggal 9 Oktober 1740 terjadi pembantaian VOC terhadap 10.000 orang Tionghoa karena dianggap memberontak. Dalam catatan Setiono (2002), pada waktu Perang Jawa, 23 September 1825 pembantaian terjadi di Ngawi. Sementara itu, pada masa kemerdekaan terjadi pembunuhan terhadap 635 jiwa di Tangerang. Karena dianggap terlibat dalam peristiwa G 30 S tahun 1965, orang-orang Tionghoa juga menjadi korban kekerasan. Pada pemerintahan Suharto awal hingga tahun 1980-an, orang-orang Tionghoa menjadi korban kekerasan, seperti pada peristiwa Malari (1974) dan kasus Solo (1980). Sementara itu, antara tahun 1996-2000 tercatat lebih dari 55 kasus kekerasan anti-Cina, beberapa di antaranya mengakibatkan korban jiwa, seperti Situbondo (10/10/1996) (Iriani, et.al, 1998; bandingkan dengan Anam, 1996; Santoso, 2002).

Hubungan antara masyarakat etnis Tionghoa dan masyarakat etnis lainnya oleh Mely G. Tan (1976) dipetakan dalam hubungan antara kelompok minoritas dan mayoritas dengan didasarkan komposisi kependudukan, sementara Koentjaraningrat (1984) mencermati persoalan etnis Tionghoa dalam kerangka integrasi nasional. Pembedaan dan penerimaan etnis Tionghoa ini lebih didasarkan pada faktor kesejarahan dan politik kewarganegaraan. Hal itu terkait kedudukan etnis Tionghoa pada masa

kolonial yang terbawa terus hingga pada masa kemerdekaan. Pada masa itu, etnis Tionghoa dikategorikan bukan *inlanders*, meski sebagian dari etnis ini, yaitu etnis Tionghoa peranakan, telah mengaku menjadi bagian dari *inlander*.

Kekerasan antara tahun 1996-2000 itu sebenarnya tidak saja dialami oleh etnik Tionghoa, tapi hampir pada semua kelompok minoritas di Indonesia, seperti orang Jawa di Aceh, orang Madura di Kalimantan, dan etnik-etnik pendatang di Ambon dan Sulawesi Tengah (Poso dan Palu). Terlepas ada provokasi atau tidak, kekerasan ini mencerminkan kondisi negara yang lemah, tidak memberikan jaminan keamanan pada kelompok-kelompok etnik dan agama di dalam masyarakat. Lebih dari itu, ada kebijakan yang kurang tepat dalam masalah hubungan antar etnik dan agama. Kebijakan kurang tepat sebenarnya tidak saja dilakukan oleh republik ini. Pada kasus agama, penelitian Brian Jeffrey Grim (2005) menunjukkan bahwa pada kasus agama, pada 196 negara di dunia ditemukan terjadi pengaturan yang terselubung dan legal yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Kecenderungan ini semakin tinggi pada masyarakat yang relatif homogen dan di dalam kondisi negara yang “kuat.”

Kasus agama ini nampaknya terjadi pada hubungan antar etnik. Alih-alih mengikuti konsep pluralisme, mengikuti penjelasan Usman Pelly (1989), kelompok dominan dalam masyarakat majemuk mencoba berfungsi sebagai wadah pembauran (*melting pot*) bagi kelompok-kelompok etnik lainnya. Sebagai kelompok minoritas (*subordinate group*), mereka menggunakan budaya kelompok etnis yang dominan (*super ordinate group*) sebagai orientasi kulturasi dalam kehidupan bersama. Dalam pergaulan sehari-hari tampak bahwa kelompok minoritas ini berusaha menggunakan bahasa, etika, pakaian, dan sistem budaya,

makanan khas kelompok dominan. Kelompok etnis yang dominan ini berfungsi sebagai kelompok budaya yang dominan.

TABEL 1

PEMETAAN KELOMPOK ETNIK, BUDAYA LOKAL DAN AGAMA DI JAWA TIMUR (SADEWO DAN MALIKI, 2001)

ETNIK	WILAYAH	KARAKTER	BAHASA	AGAMA	EKONOMI	PERKAWINAN
<i>MADURA</i>						
BANGKALAN TENGAH	BARAT	KERAS, LUGAS DAN EGALITER	MADURA "KASAR"	ISLAM SANTRI	PETANI LADANG & PEDAGANG BIROKRAT	ENDOGAMI AGAMA DAN ETNIK
SUMENEP	TIMUR					
<i>JAWA</i>						
PESISIRAN	PANTURA	KERAS, LUGAS DAN EGALITER	JAWA NGOKO & MADYA	ISLAM SANTRI	PETAMBAK PETANI TH, PEDAGANG	ENDOGAMI AGAMA
PEDALAMAN	TENGAH	TDK LUGAS BERJENJANG	NGOKO, MADYA, INGGIL	ISLAM SANTRI ABANGAN KRISTEN	PETANI DAN BIROKRAT (PRIYAYI)	ENDOGAMI AGAMA
TENGGER	TENGGER	TERTUTUP, EGALITER	JAWA PRA S. AGUNG	HINDU, ISLAM SANTRI	PETANI LADANG	ENDOGAMI AGAMA
<i>CAMPURAN</i>						
PEDALUNG- AN	T. KUDA	KERAS, LUGAS DAN EGALITER	MADURA	ISLAM SANTRI	PETANI TH DAN SAWAH, PEDAGANG	ENDOGAMI AGAMA
OSING	BLAMBANG- AN	EGALITER	OSING	ISLAM	PETANI	ENDOGAMI AGAMA
<i>NON-PENDUDUK ASLI</i>						
CINA	KOTA	EGALITER, ADA PENGELOMPOK -AN (PERANAKAN DAN TOTOK)	JAWA, MADURA, INDONESIA CINA	KRISTEN, ISLAM, BUDHA, DAN KHONGHUCU	PEDAGANG	ENDOGAMI ETNIK
ARAB	KOTA	RELATIF EGALITER, ADA PENGELOMPOK AN (SYECH DAN SAYYID)	ARAB, INDONESIA	ISLAM	PEDAGANG	ENDOGAMI ETNIK DAN KELAS
INDIA	KOTA	RELATIF EGALITER	INDIA, INDONESIA	HINDU/SIKH DAN ISLAM	PEDAGANG, PABRIKASI	ENDOGAMI ETNIK DAN AGAMA

Pada kenyataannya, seperti catatan Setiono (2002), berdasarkan *Statement Asimilasi* tanggal 24 Maret 1960 dan Piagam Asimilasi dari Seminar Kesadaran Nasional 13-15 Januari 1961, serta diikuti pembentukan LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa) atau Bakom PKB di era pemerintahan Suharto, lebih mensyaratkan asimilasi sebagai salah satu jalan keluar bagi kelompok minoritas dalam interaksi dengan kelompok mayoritas daripada menghilangkan sikap dan perilaku diskriminatif. Konsep yang demikian ini berlangsung terus selama pemerintahan Suharto. Ditambah dengan Inpres No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-istiadat Cina, dalam kerangka pembauran orang-orang Tionghoa disarankan untuk mengganti dengan nama melayu dan bahkan masuk agama Islam, seperti dicatat oleh James Dananjaya (2003; perhatikan juga Suryadinata, 2003). Oleh karena itu, tesis Slametmulyana (1980-an) tentang peran etnis Tionghoa dalam penyebaran Islam di Nusantara yang sempat ditolak oleh publik, kemudian diterima dan membenarkan tindakan orang-orang Tionghoa untuk menjadi *mualaf*. Begitu pula dengan pandangan Akh. Muzakki (**Jawa Pos**, 14/2/2007) tentang peran Muslim Tionghoa.

Mestinya, pembauran bukanlah suatu hal yang utama dalam hubungan antar kelompok etnik dan agama di Indonesia. Pertama, proses penerimaan yang “setengah hati” itu mengakibatkan rasa tidak nyaman pada kelompok minoritas. Akibatnya, apa yang dilihat oleh Hans Dieter Evers (1985) bahwa terjadi perubahan dari segregasi etnik menjadi segregasi kelas sosial itu tidak terjadi sepenuhnya. Orang-orang Tionghoa dan kelompok minoritas lainnya lebih nyaman tinggal di perumahan kelas menengah atas. Tidak saja dalam pemukiman, mereka pun lebih menyukai menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta

yang siswa dari komunitas lokalnya sedikit (Artono dan Sadewo, 2005; Yunidha, 2007; Paryono, 2007; bandingkan dengan Pelly, 2003). Artinya, tidak ada ruang publik yang luas untuk berinteraksi antara kelompok minoritas dan mayoritas. Kedua, dari kajian antropologis, terdapat pola preferensi perkawinan yang berbeda antara kelompok etnik minoritas (bukan penduduk lokal) dan kelompok etnik mayoritas (atau pada masa pemerintah Suharto dan sebelumnya diistilahkan pribumi). Kelompok etnik minoritas lebih mengutamakan endogami etnik, sementara itu kelompok etnik mayoritas lebih endogami agama. Terlebih lagi, terdapat mitos-mitos yang secara tidak langsung melarang perkawinan eksogami, seperti laki-laki Jawa menghindari perkawinan dengan wanita dari etnik Tionghoa karena kalah *abu*-nya. Sebaliknya, ada ruang-ruang kesamaan pekerjaan yang mengakibatkan saling berkompetisi dan konflik (Sadewo dan Maliki, 2001; Suparlan, 2003).

Dalam konteks politik di Indonesia, kiprah etnis Tionghoa berada dalam kondisi yang pasang surut. Meski sejak abad ke-5 sudah masuk dan berinteraksi dengan masyarakat di nusantara, stigma “kalangan pendatang” terus melekat hingga sekarang. Hal ini dikarenakan situasi politik yang sering membawa etnis Tionghoa berada di pinggiran sejarah.

Di era kolonialisme, etnis Tionghoa juga menjadi korban perlakuan hukum dan peradilan yang diskriminatif. Dalam perkara kriminal, tertuduh Tionghoa harus diadili di *Landraad*, yaitu pengadilan bagi warga pribumi karena dalam aturan hukum pidana orang Tionghoa statusnya disamakan dengan kaum pribumi (*gelijkgesteld met de Inlanders*). Dalam perkara sipil/perdata yang berkaitan dengan soal perdagangan, hutang-piutang, dan harta warisan, peradilan orang Tionghoa ditangani *Raad van Justitie*, yaitu peradilan untuk orang Eropa, apalagi

sejak tahun 1848 hukum dagang Hindia Belanda (*Wetboek van Koophandel*) memasukkan orang Tionghoa dalam yurisdiksinya (Darini, 2008)

Menjelang akhir abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda juga mengeluarkan aturan-aturan lain yang intinya adalah untuk membatasi gerak langkah etnis Tionghoa di Indonesia. Melalui *Wijkenstelsel* pemerintah kolonial menciptakan sejumlah pusat pemukiman etnis Tionghoa di beberapa kota besar di Indonesia yang disebut sebagai kampung pecinan. Etnis Tionghoa diisolasi secara fisik sehingga antara etnis Tionghoa dengan penduduk pribumi benar-benar terpisah. Selain *wijkenstelsel*, pemerintah kolonial juga memberlakukan *passenstelsel* (pas jalan) yang mengharuskan etnis Tionghoa untuk meminta izin bila akan melakukan perjalanan.

Di era kemerdekaan ada beberapa tokoh Tionghoa yang memiliki peranan penting. Namun kembali, dalam sejarah bangsa nama dan identitas tidak pernah terungkap secara gamblang. Pada tahun 1945, empat orang etnis Tionghoa turut serta merancang UUD RI dan menjadi anggota *Dokuritsu Junbi Chōsakai* atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan seorang menjadi anggota *Dokuritu Zumbi Inkai* atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Dalam pertempuran Surabaya melawan pasukan Inggris pada bulan November 1945, tidak sedikit peranan pemuda-pemuda Tionghoa. Wartawan “Merah Putih” yang terbit di Jakarta menyatakan di Surakarta mengenai kunjungannya ke medan pertempuran Surabaya antara lain, seorang pemimpin Tionghoa telah berpidato di depan corong Radio Surabaya tentang kejaman yang dilakukan tentara Inggris terhadap rakyat Sura-

baya. Pidato tersebut ditujukan kepadapemerintah Tiongkok di Chungking, dan sebagai jawabannya Radio Chungking menyerukan kepada para pemuda Tionghoa agar bahu membahu bersama rakyat Indonesia melawan keganasan tentara Inggris. Seruan ini akibat pemboman pasukan Inggris yang mengakibatkan lebih dari seribu orangTionghoa menderita luka-luka dan meninggal dunia. Menyambut seruan tersebut pemuda-pemuda Tionghoa mengorganisasikan diri ke dalam pasukan bela diri di bawah bendera Tiongkok. Mereka merebut senjata dan berangkat ke front pertempuran untuk melawan pasukan Inggris (Setiono, 2002).

Menurut catatan Setiono, di era Orde Lama, Di masa Demokrasi Parlementer (1950-1959), delapan orang etnis Tionghoa menjadi anggota DPRS yaitu : Siauw Giok Tjhan, Tan Boen Aan, Tan Po Gwan, Teng Tjin Leng, Tjoa Sie Hwie, Tjoeng Lin Sen (pada bulan Agustus 1954 diganti Tio Kang Soen), Tjung Tin Jan dan Yap Tjwan Bing (pada bulanAgustus 1954 diganti Tony Wen alias Boen Kim To). Di dalam kabinet Ali Satroamidjojo I Dr. Ong Eng Die ditunjuk menjadi Menteri Keuangan dan Lie Kiat Teng menjadi Menteri Kesehatan. Dalam DPR hasil Pemilihan Umum tahun 1955 terpilih beberapa orang etnis Tionghoa, yaitu Oei Tjeng Hien (Masjumi), Tan Oen Hong dan Tan Kim Liong (NU), Tjung Tin Jan (Partai Katholik), Lie Po Joe (PNI), Tjoo Tik Tjoen (PKI) dan Ang Tjiang Liat (Baperki). Di Konstituante terpilih sebagai anggota antara lain: Siauw Giok Tjhan, Oei Tjoe Tat, Yap Thiam Hien, Go Gien Tjwan, Liem Koen Seng, Oei Poo Djiang-kesemuanya dari Baperki, Tony Wen dari PNI, Oei Hay Djoen dan Tan Ling Djie dari PKI.

Peran dan ruang bagi etnis Tionghoa mengalami masa surut ketika memasuki era Orde Baru. Periode ini adalah periode awal

pembentukan berbagai macam peraturan yang terkait dengan etnis Tionghoa beserta dengan perumusan konsep asimilasi yang ingin dijalankan bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Pada tahap awal dan akhirnya menjadi dasar dari semua peraturan pemerintah adalah tiga keputusan yang ditetapkan oleh MPRS tahun 1966. Ada tiga jenis peraturan yang jelas ditujukan bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Pertama, Resolusi MPRS No. III/MPRS/1966 dengan jelas pada salah satu bagiannya menyatakan asimilasi sebagai satu-satunya jalan bagi etnis Tionghoa untuk meleburkan diri. Kedua, Resolusi MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan secara tegas mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Undang-undang larangan terhadap sekolah-sekolah asing dan agar pemerintah membina kebudayaan-kebudayaan daerah. Ketiga, Resolusi MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers menyatakan bahwa penerbitan pers dalam bahasa Tionghoa merupakan monopoli pemerintah (Jahya, 1999).

Secara garis besar, di era Orde Baru kebijakan pemerintah yang menonjol terhadap etnis Tionghoa adalah pelarangan budaya Cina. Perhatian yang kedua adalah pembauran ekonomi, yaitu ekonomi pribumi gaya baru. Ketiga adalah penciptaan sistem pengawasan kewarganegaraan yang terpadu. Akibatnya tidak banyak warga Tionghoa yang terlibat langsung dalam politik. Sebagian besar justru menjadi aktor ekonomi yang cenderung menghindari persoalan politik, dan bersentuhan dengan persoalan politik jika berkaitan dengan kepentingan bisnis.

Hal-hal demikian kemudian mulai dieliminasi pada pemerintahan Abdurahman Wahid (Gus Dur). Pengakuan kembali Khonghucu sebagai agama resmi berikut kelima agama lainnya dan diikuti pendirian Bimas Konghucu di Departemen/Ke-

mentrian Agama. Tidak saja hanya itu, pemerintah juga membuka ruang pendirian partai politik. Salah satunya adalah Partai Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam visinya, partai ini ingin mewujudkan masyarakat yang mempunyai persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Untuk itu, program PBI menekankan tiga hal, salah satu di antaranya pencabutan undang-undang atau peraturan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan HAM. Partai ini menjadi rumah bagi kelompok minoritas, khususnya etnis Tionghoa, meski memperoleh suara yang tidak besar pada pemilu tahun 1999.

BAB III

MASYARAKAT TIONGHOA DALAM LINGKARAN SOSIAL EKONOMI BUDAYA YANG BERBEDA

Kota Surabaya: Rumah Minimalis bagi semua Etnis

Aspek Ekonomi. Sebagai kota metropolitan sekaligus ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya berkembang menjadi kota modern yang dicirikan dengan berbagai bangunan fisik yang megah. Mulai dari pasar modern seperti mall, supermarket, hotel berbintang, klub, diskotik, hingga kemacetan di saat jam-jam kantor dan di hari-hari kerja. Berbagai kemewahan dan kemodernan kota ini yang juga menjadi salah satu pemicu munculnya urbanisasi dari berbagai etnis dan penduduk dari pedesaan dan pinggiran untuk mengais rejeki. Karena itu, merupakan keniscayaan jika kota Surabaya memiliki karakteristik dalam aspek heterogenitas dan kemajemukan demografis sekaligus etnisitasnya. Wajar, apabila ada beragam etnis di Surabaya yakni, Madura, Arab, Cina, Jawa, dan Batak.

Konsekuensi logis dari kemajemukan demografis dan etnisitas itu justru dapat memunculkan dimensi kekuasaan atau dominasi dari salah satu pihak. Banyak faktor yang menjadi latar belakang kemunculan kekuasaan dalam masyarakat majemuk ini. Antara

lain faktor modal dan faktor tempat tinggal (lingkungan). Modal pada konteks ini tidak hanya dibaca melalui modal ekonomis sebagaimana konsep Marxian, tapi juga bisa dikaji dalam perspektif Pierre Bourdieu (1994). Artinya, bahwa modal tidak akan dapat diraih oleh salah satu kelompok sosial apabila mereka tidak memiliki satu kemampuan tertentu yang melandasi perilaku mereka di dalam penguasaan salah satu aspek kehidupan.

Dalam aspek ekonomi misalnya, seseorang atau kelompok orang tidak akan mampu memiliki akumulasi surplus modal apabila tidak memiliki kemampuan dan skill untuk meraihnya. Pengusaha pun tidak akan mampu memiliki kekuatan ekonomis apabila mereka tidak memiliki semangat kerja (*spirit of work*) dan didorong kultur keluarga yang berorientasi pada kekuatan nilai-nilai kapitalisme. Masyarakat Surabaya sendiri hakekatnya secara fenomenologis memiliki dimensi yang kurang lebih sama dengan hal ini. Yakni, adanya kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Dilihat dari sisi kuantitas, kelompok mayoritas adalah masyarakat pribumi seperti masyarakat (etnis) Jawa dan Madura. Sementara itu, kelompok minoritasnya adalah masyarakat (etnis) Tionghoa.

Sekalipun masyarakat/etnis Tionghoa tergolong minoritas kuantitasnya, tetapi dalam hal ekonomi mereka justru terbilang kelompok dominan. Hampir kebanyakan bidang bisnis dan medan perdagangan di Surabaya didominasi oleh orang Tionghoa. Ini bisa dilihat dari kepemilikan usaha seperti pertokoan, mal, hotel ataupun restoran di Surabaya. Jikalau kita bertanya siapakah pemiliknya, maka jawabnya adalah orang Cina. Lantas, jikalau pertanyaan tersebut dibalik menjadi siapakah para pekerjanya, maka jawabnya adalah orang-orang pribumi (seperti Jawa dan Madura). Keberadaan etnis Tionghoa yang tergolong

minoritas menjadi semangat mereka untuk menguasai bidang perdagangan. Dan, ini pun menjadi salah satu domain yang diinternalisasikan di dalam generasi keluarga Tionghoa sejak lama.



Gambar 1
Patung Singapoera di perumahan mewah Surabaya (atas) sebagai simbol globalisasi. Singapura sebagai acuannya (foto aslinya di bawah)

Selain dominasi ekonomi dalam bentuk penguasaan medan perdagangan, satu hal berikutnya yang membuat perbedaan kekuasaan diantara kelompok masyarakat di Surabaya adalah konsentrasi tempat tinggal. Pengelompokan kelompok berdasarkan tempat tinggal ini tanpa disadari memunculkan suatu prestise sosial tersendiri yang dibaliknya memuat segregasi sosial berdasarkan ekonomi. Menurut Jean Baudrillard, pemilihan barang-barang prestisius ataupun sesuatu yang berkelas merupakan bagian dari karakteristik kelas sosial di masyarakat (Baudrillard, 2005). Dalam masyarakat Surabaya, kekuasaan dominasi kelas sosial ini dapat dilihat dalam pemilihan tempat tinggal di perumahan elite seperti Galaxy, dan Pakuwon. Perumahan yang dikenal prestisius dan mewah di Surabaya ini banyak ditinggali oleh kebanyakan masyarakat Tionghoa. Konsentrasi tempat tinggal inilah kemudian memunculkan suatu persepsi sebagian besar masyarakat di sana bahwa, golongan minoritas Tionghoa merupakan golongan yang memiliki kekuasaan di dalam aspek ekonomis dibandingkan dengan golongan pribumi. Bahkan lebih dari itu, memunculkan juga persepsi sosial bahwa Tionghoa merupakan kelompok masyarakat yang eksklusif.

Meskipun terjadi sebuah praktek dominasi ekonomi oleh golongan Tionghoa, ternyata tidak membuat terjadinya sentimen etnis dari kelompok mayoritas mencuat ke permukaan (manifestasi sentimen etnis). Padahal, di sejumlah daerah, manifestasi sentimen etnis dari mayoritas terhadap minoritas (seperti golongan Tionghoa) dapat menimbulkan konflik-kekerasan yang eskalatif. Di Solo dan Jakarta pada medio 1998 silam telah terjadi suatu konflik-kekerasan dari golongan

pribumi (yang kebanyakan masyarakat Jawa) terhadap golongan Cina.

Akibatnya, banyak korban berjatuhan dan puluhan rumah serta bangunan modern (yang diidentikkan dengan kepemilikan etnis Cina) luluh lantak oleh perilaku anarkisme golongan pribumi yang terpicu oleh suatu manifestasi sentimen etnis (anti Cina) yang tinggi. Di Surabaya, sejauh ini tidak ada sentimen anti-Cina yang kemudian memunculkan tragedi kemanusiaan seperti halnya di Solo dan Jakarta. Jika pun ada konflik sosial yang terjadi di ranah publik, maka etnis Tionghoa itu cenderung menyelesaikannya melalui jalur hukum. Sementara itu, jikalau konflik sosial itu terjadi di ranah domestik, jalan yang ditempuh adalah jalur kultural yakni melalui tokoh-tokoh agamanya.

Aspek Sosial-Budaya. Perkembangan modernitas, liberalisasi atau disparitas ekonomi menciptakan suatu kesenjangan sosial di masyarakat. Implikasinya kemudian, berbagai pelayanan publik pun semakin mahal dan sulit diakses oleh mereka yang tidak memiliki modal ekonomi yang kuat. Tetapi, berbagai kalangan masyarakat melihat kondisi seperti ini justru terkesan pasrah. Artinya, mereka menganggap pemerataan kesejahteraan sosial yang selama ini seringkali dijadikan jargon politik kaum elite politik justru menemui titik kulminasi. Sehingga, muncullah adagium di masyarakat bahwa yang kaya makin kaya dan yang miskin makin sengsara. Di wilayah Surabaya, kondisi demikian tidak bisa tidak untuk dihindari. Salah satu indikasinya untuk melihat adanya ketimpangan kelas sosial dan disparitas ekonomi ini adalah melalui perbedaan sarana transportasi yang digunakan kebanyakan masyarakat. Mobil pribadi yang mewah banyak terlihat di jalan raya, sementara hal yang sama juga terjadi yakni, semakin banyak pula orang yang menggunakan kendaraan umum dengan biaya relatif terjangkau.

Kentalnya segregasi kelas sosial berbasis ekonomi ini, cenderung membuahkan konflik sosial yang keras tiada henti hingga terwujudnya pemerataan kesejahteraan. Sebagaimana dikatakan kaum marxis bahwa konflik sosial yang berkepanjangan itu akan selalu terjadi bila kesenjangan ekonomi antara mereka yang miskin dan bourgeois masih menganga lebar. Namun, di Surabaya menunjukkan fenomena yang berbeda. Ini disebabkan, sumbu pemicu terbesarnya seperti sentimen anti-Cina, tidak memiliki porsi yang maksimal di masyarakat (lihat kembali data sosial-ekonomi di atas). Nah, persoalannya apa yang membuat konflik sosial berbasis etnis minoritas vs mayoritas ini tidak meledak menjadi fenomena kekerasan? Tampaknya jawabannya terkait erat dengan sisi kultural di masyarakat.

Pertama, masih adanya nilai-nilai solidaritas dan kegotong-royongan antar etnis. Ini terlihat dari tradisi sambatan seperti mengunjungi tetangga di sekitarnya yang mempunyai hajatan ataupun terkena musibah. Atau juga, berpartisipasi pada kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan termasuk kegiatan keamanan lingkungan (Siskamling). Dan, aktifitas sosio-kultural ini pun diikuti oleh semua kelompok etnis, baik yang mayoritas ataupun yang minoritas.

Tidak hanya di dalam kegotong-royongan, dalam hal pemerintahan di tingkat RT dan RW pun masyarakat Tionghoa juga seringkali hadir dan berpartisipasi ketika ada rapat RT dan RW di kampung mereka tinggal. Tengok saja di daerah Pabean, daerah yang kental dengan dominasi ekonomi orang Tionghoa. Di sana, interaksi sosial berbasis kultural antar etnis pun masih terjalin dengan baik. Tindakan mereka inilah yang kemudian membuat heterogenitas etnis menjadi melebur dalam suasana perbedaan (*unity in diversity*) melalui jalur-jalur kultural.

Kedua, kentalnya nilai-nilai patron-klien dalam hubungan kerja. Sebagaimana telah dijelaskan pada topik sebelumnya bahwa dalam hubungan kerja, golongan etnis Tionghoa pada umumnya lebih menjadi pemilik modal atau pemilik usahanya. Tetapi sebaliknya, masyarakat pribumi seperti Jawa dan Madura justru menjadi pekerjanya. Memang benar, bila dilihat dari jargon kerjanya, hubungan kerja ini bisa dikatakatan sebagai sistem kerja kapitalisme. Dengan kata lain, ada suatu mekanisme eksploitasi dari majikan terhadap pekerjanya. Salah satu indikasinya adanya wacana pelabelan (*labeling discourse*) seperti istilah *juragan* guna menyebut pemilik usaha (Tionghoa) dan istilah *pekerja* untuk menyebut mereka yang menjual tenaganya/kuli (Madura dan Jawa).

Tetapi, sebagian besar masyarakat justru menganggap bahwa hubungan kerja seperti itu (Tionghoa dengan Jawa-Madura) merupakan hubungan kerja yang bersifat simbiosis mutualisme. Atau, dalam istilah sosiologisnya disebut hubungan patron-klien. Dalam hubungan patron-klien ada satu hal yang tidak dapat dipungkiri, yakni adanya perasaan saling memiliki (*sense of having*) dan saling mengisi (*sense of being*) di dalam kerja. Saling memiliki itu terlihat dari adanya perhatian yang intens terhadap suatu hal yang berharga seperti asset toko ataupun perusahaan. Kehilangan asset berharga ini, maka membuat penghasilan dan pemasukan bagi para pekerjanya berkurang. Karena itulah, pengamanan asset berharga perusahaan itu laik dilakukan pekerjanya. Seperti yang dipaparkan oleh Isvanda:

Sementara, perasaan saling mengisi dapat terlihat dari adanya kesadaran dari kedua belah pihak agar saling memperhatikan kewajiban dan hak-haknya. Tentu saja, pelaksanaan hak dan kewajiban ini menjadi amat penting mengingat hubungan kerja mereka bisa dibilang rentan terhadap konflik. Artinya, jika

terjadi tindakan semena-mena dari juragannya, maka ia bisa saja ditinggal oleh para pekerjanya. Bahkan, jika ini terjadi, maka bisa saja memunculkan tindakan negatif dari pekerjanya. Dengan demikian, melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak para pekerja merupakan hal yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pemilik usaha.

Ketiga, adanya sikap inklusifitas beragama, toleransi sosial, sekaligus proses komunikasi lintas agama. Selama ini, dalam kehidupan masyarakat seringkali terjadi konflik sosial yang dipicu oleh sentimen agama. Kasus Poso, Maluku, bom di tengah momentum hari besar agama tertentu adalah satu bukti nyata betapa rapuhnya nilai-nilai toleransi dan inklusifitas keber-agama-an kita. Lemahnya derajat pengakuan, saling menghargai dan menghormati pemeluk agama lain merupakan akar persoalan yang utama. Di daerah yang majemuk seperti halnya perkotaan, keberadaan berbagai macam agama terkadang dapat menjadi dimensi tersendiri yang harus disikapi secara serius oleh pihak berwenang dan berkompeten untuk menghindari terjadinya ledakan konflik-kekerasan.

Surabaya yang dikenal dengan perkotaan yang multi etnis dan multi agama, ternyata memiliki nilai toleransi yang cukup baik dalam dimensi keber-agama-an masyarakatnya. Komunikasi lintas agama sudah terbangun dengan cukup baik di Surabaya. Adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah bukti nyata adanya komunikasi lintas agama di dalam kehidupan masyarakatnya. Seperti halnya di daerah Nyamplungan yang merupakan salah satu sentra perdagangan tekstil dan garmen dimana pemiliknya kebanyakan orang Tionghoa, justru tak menunjukkan adanya sentimen keagamaan dari masyarakat pribumi.

Memang benar, ormas keagamaan yang paling besar di Surabaya adalah NU dan Muhammadiyah. Kedua ormas inilah yang bagi sebagian besar masyarakat Islam dijadikan rujukan untuk melakukan aktifitas keagamaannya. Akan tetapi, ini bukan berarti perbedaan agama non Islam pun dideskreditkan keberadaannya. Sebab, ormas Islam tersebut sama-sama mengajarkan sikap serta nilai-nilai inklusifitas beragama. Artinya, di dalam ajaran agama mana pun, tidak terkecuali Islam ataupun non Islam, selalu mengajarkan dan menyebarkan kepada pemeluknya tentang ajaran perdamaian dan menghormati keberadaan agama lainnya.

Memang diakui, bahwa terkadang ranah agama itu disusupi oleh kepentingan politik praktis dari sekelompok orang. Di Pabean misalnya, pada saat Pilkada Jatim baru-baru ini saja terdengar kabar ada salah satu tim sukses calon tertentu yang mulai menghegemoni massa melalui pendekatan agama. Mungkin, dalam taraf tertentu hal ini dapatlah dimaklumi karena rendahnya kesadaran kultural dari mereka yang ingin jalan pintas mengeruk keuntungan politik. Hanya saja, yang amat dikhawatirkan jika hegemoni politik tersebut justru mempengaruhi nilai-nilai inklusifitas keberagaman mereka. Jika ini yang terjadi, maka akan sangat dimungkinkan sentimen agama bisa muncul di dalam kehidupan masyarakat. Dan tragisnya, sentimen agama yang hadir di tengah-tengah masyarakat majemuk dari sisi agama itu bisa menimbulkan konflik yang dahsyat dan memakan korban massal. Karena itulah, kesadaran masing-masing pemeluk agama dan para tokoh agamanya diperlukan untuk mengantisipasi tragedi kemanusiaan ini.

Kabupaten Tuban: Daerah Pesisiran yang Menjadi Tempat Singgah Para Pedagang

Aspek Ekonomi. Sejak zaman kolonialisme Belanda, sampai berakhirnya pemerintahan Orde Baru, masyarakat Tionghoa selalu mendominasi kegiatan perdagangan di Indonesia. Jumlah penduduk minoritas Tionghoa yang hanya sekitar 4% dari seluruh penduduk Indonesia, dapat menguasai sekitar 75% dari roda perekonomian Indonesia (Ibnu Purna, 1999:49). Tentu saja, ini tak bisa dilepaskan dalam konteks sejarah panjang keberadaan Tionghoa di Nusantara. Pada era kolonialisme, rata-rata pedagang Tionghoa dijadikan alat Belanda di dalam melaksanakan kegiatan bisnis-perdagangan Belanda, khususnya sebagai pedagang perantara.

Dominasi etnis Tionghoa di bidang ekonomi tidak diragukan kembali dan dapat tergambarkan dalam struktur masyarakat Tionghoa di Indonesia yang didasarkan profesi penduduknya, yaitu: (1) ada 170 pengusaha adalah pengusaha-pengusaha besar/konglomerat; (2) kurang lebih 5.000 pengusaha adalah pengusaha-pengusaha menengah, (3) ada 250.000 pengusaha adalah pengecer kecil seperti warung atau pertokoan (dengan perkiraan sekitar 60 pengusaha kecil di tiap kecamatan dan terdapat 4.028 kecamatan di seluruh Indonesia pada tahun 1998, dan (4) sisanya adalah petani, nelayan, buruh dan pegawai negeri (Leo, 2005:409)

Modal sosial yang dibangun oleh masyarakat Tionghoa Tuban adalah dengan memperkuat bidang perekonomian khususnya bisnis perdagangan. Jalur-jalur strategis perekonomian di wilayah Tuban dikuasai oleh masyarakat Tionghoa. Selain akibat dari kebijakan politik pemerintah yang berkuasa dari tahun ke

tahun, keberhasilan ekonomi Tionghoa juga didukung oleh kerja keras dan hidup hemat sesuai dengan ajaran Konghucu yang merupakan sistem kepercayaan orang-orang Tionghoa.

Pada awalnya, orang-orang Tionghoa yang datang sebagai pengembara, rata-rata dari mereka tidak mempunyai bekal material apa-apa. Dengan kemampuan bersikap teguh, bekerja keras, tekun dan sabar serta hemat dalam pengeluaran, akhirnya mereka menonjol dalam tingkat kehidupan ekonominya dibandingkan kehidupan ekonomi penduduk lokal. Dan ditambah, kebijakan pemerintah kolonial dan negara Indonesia memberikan dampak besar terhadap peran ekonomi minoritas Tionghoa di Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Supriyadi Agusjaya, mantan Kepala Sosial Politik Tuban pada tahun 1999 – 2004:

Artinya, modal yang dimiliki itu tidak hanya dibaca melalui modal ekonomis sebagaimana konsep Marxian, tapi juga bisa dikaji dalam perspektif Pierre Bourdieu (1994). Artinya, bahwa modal tidak akan dapat diraih oleh salah satu kelompok sosial apabila mereka tidak memiliki satu kemampuan tertentu yang melandasi perilaku mereka di dalam penguasaan salah satu aspek kehidupan.

Meskipun terjadi praktek dominasi ekonomi oleh golongan Tionghoa, tetapi sentimen etnis dari kelompok mayoritas tidaklah muncul ke permukaan. Padahal, di sejumlah daerah, manifestasi sentimen etnis dari mayoritas terhadap minoritas (seperti golongan Tionghoa) dapat menimbulkan konflik-kekerasan yang eskalatif.

Sejauh ini tidak ada sentimen anti-Tionghoa yang dapat menimbulkan kerusuhan sosial yang pernah terjadi di Solo dan Jakarta. Akibat kesenjangan ekonomi yang tercipta antara

penduduk setempat dan Tionghoa menyebabkan terjadi kerusuhan anti Tionghoa. Bisnis perdagangan milik Tionghoa dihancurkan seperti pertokoan, showroom mobil, supermarket bahkan pabrik roti. Namun, hal ini tidaklah terjadi di Tuban. Jika pun ada konflik sosial yang terjadi di ranah publik, maka golongan etnis Tionghoa cenderung menyelesaikannya melalui jalur hukum. Sementara itu, jikalau konflik sosial itu terjadi di ranah domestik, jalan yang ditempuh adalah jalur kultural yaitu dengan melibatkan pihak ketiga atau lembaga formal yang ada.

Dominasi ekonomi etnis Tionghoa di Tuban dimanfaatkan pula oleh masyarakat Tuban. Mereka diibatkan dalam lini pembangunan. Mereka juga dijadikan sebagai bendahara lembaga politik, seperti partai politik, sebagai bendahara. Mereka menjadi sumber keuangan. Mereka diminta memberi dukungan materi.

Aspek Sosial-Budaya. Klenteng Kwan Sing Bio yang terletak di kota Tuban merupakan klenteng yang terbesar di Indonesia, dan umatnya pun menyebar sampai di Asia Tenggara. Tanggal berdirinya klenteng ini tidak diketahui persisnya, tetapi diperkirakan sejak 200 tahun yang lalu. Klenteng ini sangat ramai dikunjungi oleh etnis Tionghoa, konon karena memiliki cerita yang dianggap keramat oleh masyarakat Tionghoa dan juga karena satu-satunya klenteng yang menghadap ke laut bebas. Di zaman Orde Baru, klenteng merupakan tempat ibadah yang diperuntukkan bagi tiga agama yaitu Budha, Taoisme, dan Konghucu yang terkenal dengan nama Tri Darma.



Gambar 2

Klenteng Kwan Sin Bio diakses dari <http://www.kaskus.co.id/thread/52edd932a1cb17d87f8b45ce/6-destinasi-wisata-religi-favorit-di-indonesia>. Tanggal 20 April 2013

Selain klenteng Kwan Sing Bio di Tuban juga terdapat 1 klenteng lagi yaitu Tjioe Liong Kiong yang konon usianya lebih tua daripada usia masjid Sunan Bonang. Letak klenteng Tjioe Liong Kiong yang berdekatan dengan Masjid Sunan Bonang juga menunjukkan bahwa relasi inter etnis Jawa-Tionghoa sejak dahulu memang tidak ada masalah. Bahkan di dalam makam Sunan Bonang juga dapat kita temukan sebuah Gentong yang pada jaman dahulu dipergunakan sebagai tempat air minum santri dan konon merupakan tanda persahabatan Bangsa Cina terhadap Sunan Bonang.

Bagi masyarakat Tionghoa, klenteng bukan sekedar tempat ibadah semata, tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial dan ekonomi. Itulah sebabnya, klenteng menjadi sangat penting dalam masyarakat Tionghoa terutama di daerah Pecinan di suatu kota. Hal ini juga terjadi di kelenteng Kwan Sing Bio. Sejak tahun 1970, setiap harinya makanan dan minuman selalu disediakan secara gratis untuk semua pengunjung klenteng. Lebih dari itu, sebagian besar yang bekerja di klenteng adalah etnis Jawa.

Sejak diakuinya Konghucu sebagai agama di Indonesia, memberikan angin positif bagi keberadaan Tionghoa di Indonesia. Di dalam ajaran Konghucu dijelaskan bahwa kita semua adalah saudara meskipun berbeda keyakinan, etnis, serta sukunya. Sehingga, antar sesama manusia tak boleh membedakan, apalagi saling menjelek-jelekkkan antara sesamanya.

Kabupaten Situbondo:

Rumah Orang Pedalungan yang Penuh Dinamika

Aspek Ekonomi. Jika kota Surabaya memiliki heterogenitas yang tinggi akan etnisitasnya, maka di Situbondo kelompok etnisnya kebanyakan didominasi oleh orang Pedalungan (campuran antara Jawa dan Madura mulai abad 19). Meskipun demikian, mereka memiliki ikatan yang erat terhadap darah Maduranya. Terbuktinya, di dalam kesehariannya bahasa yang digunakan masyarakat Jawa Pedalungan ini adalah bahasa Madura khas Situbondo. Tapi, yang tak jauh beda dengan kota Surabaya adalah keberadaan etnis Tionghoa. Mereka ini tergolong kelompok minoritas di Situbondo, seperti halnya di Surabaya.

Jika pada umumnya di sejumlah daerah, masyarakat Tionghoa ini mendominasi perekonomian atau medan perdagangan, maka di Situbondo kekuatan mereka pun lebih berimbang. Karena, di Situbondo mereka yang mendominasi perdagangan bukan hanya Tionghoa melainkan juga orang Madura. Artinya jalur ekonomi masyarakat di Situbondo terbagi dua, yakni Madura dan Tionghoa. Namun, kondisi kompetisi dan friksi ekonomi antara Madura vs Tionghoa ini memunculkan persoalan. Yakni, berpotensi menjadi api penyulut salah satu sumbu pemicu konflik-kekerasan tersendiri. Pada tahun '96 dan '97 misalnya.

Ketika itu, terjadi kerusuhan sosial yang disertai penjarahan berbagai toko dan aset berharga usaha masyarakat Tionghoa di Situbondo. Berdasarkan temuan di lapangan, penjarahan toko orang-orang Tionghoa ini merupakan imbas dari kecemburuan sosial yang berbasis ekonomi. Anggapan yang bergulir di masyarakat pun menunjukkan bahwa dominasi ekonomi yang dilakukan golongan Tionghoa itu membatasi keleluasaan usaha perdagangan masyarakat pribumi. Karena itu, ketika meletus kerusuhan sosial, maka aksi penjarahan yang dilakukan orang pribumi terhadap toko atau usaha Tionghoa menjadi tak terhindarkan lagi.

Aspek Sosial-Budaya. Situbondo merupakan basis etnis Madura, maka tak heran jika di sana agama mayoritas masyarakatnya adalah agama Islam. Apabila dikaji ke wilayah Madura sendiri, maka nilai-nilai ke-Islam-an masyarakatnya sangat dikenal konservatif. Artinya, aktifitas kehidupan masyarakatnya selalu dilihat dalam aspek agama (pada konteks ini Islam). Dan ketaatan sekaligus kepatuhan masyarakat di sana terhadap figur agama seperti Kiai lebih kental dibandingkan daerah lainnya. Kondisi ini pun terjadi di Situbondo. Masyarakat Situbondo

lebih mendengarkan titah dan ucapan Kiai dibandingkan titah kepala desa dan sejumlah penguasa birokrasi lainnya.

Bagi mereka, Kiai itu dianggap memiliki derajat yang tinggi dalam aspek teologis dan supranatural. Kiai adalah sosok yang memiliki kedekatan dengan tuhan dan surga. Kiai dianggap penghubung antara yang di atas langit dan yang di bumi. Kiai pun dianggap keturunan wali Allah. Sehingga, mereka yang menghina ataupun menentang Kiai akan dianggap tidak sopan, tidak beradab, bahkan bid'ah. Tak heran jika umat Islam di Situbondo itu pun akan membela mati-matian apabila sang Kiai itu dinodai dan juga diganggu kehidupannya oleh orang lain. Seperti halnya yang terjadi pada tahun 1996 silam.

Konon katanya, waktu itu ada seorang bernama Soleh yang melakukan penodaan terhadap seorang Kiai di Situbondo. Merasa tak terima dengan perlakuan orang tersebut, maka massa pendukung dan pengikut sang Kiai itu pun menuntut pihak pengadilan untuk mengadili si Soleh. Tuntutan massa itu pun terkabulkan. Sehingga, si Soleh pun dihukum 5 tahun oleh pihak pengadilan atas tindakan penodaan nama baik sang Kiai itu. Namun, hukuman tersebut masih dinilai ringan. Karena, hukuman yang pantas bagi Soleh adalah hukuman mati. Dari situlah, kemudian massa dan simpatisan Kiai itu pun mencari Soleh untuk dihukum mati. Tapi, si Soleh pun tidak ditemukan. Menurut kabar beredar, si Soleh sembunyi di salah satu gereja. Mendengar hal itu, maka massa pun mengamuk sekaligus membakar hampir sebagian gereja yang ada di sana agar si Soleh itu menyerahkan diri.

Karena si Soleh dianggap bersembunyi di Gereja, maka isu penghakiman massa itu pun berubah menjadi sentimen agama. Yakni, menganggap tindakan penodaan Kiai yang telah

dilakukan Soleh itu merupakan rencana dan rekayasa dari pihak non-Islam. Maka, chaos dan aksi kekerasan terhadap pihak non-Muslim pun terjadi. Dan pihak pertama dan utama yang menjadi sasaran amukan dan kekerasan massa itu adalah etnis Tionghoa. Tak pelak lagi, sejumlah toko orang Tionghoa itu pun mulai dijarah, dirampok, dan ada yang dibakar massa. Hal ini kemudian membuat aktifitas ekonomi masyarakat menjadi lumpuh total.

Menghadapi aksi kekerasan dan kerusuhan sosial tersebut, masyarakat Tionghoa pun melakukan strategi survival bersifat Sosio-Kultural. Yakni, meminta bantuan Pagar Nusa yang merupakan bagian organisasi NU yang bergerak di dalam sektor bela diri atau pencak silat. Ada alasan tersendiri mengapa masyarakat Tionghoa meminta bantuan pada Pagar Nusa ini. Dengan meminta bantuan pagar Nusa, maka aset ‘perusahaan’ mereka itu bisa diamankan dari penjarahan dan anarkisme massa. Sebab, Pagar Nusa itu merupakan salah satu garda depan penjaga keutuhan bangsa dan agama Islam.

Jadi, masyarakat yang beragama Islam di Situbondo akan merasa sungkan menjarah aset ekonomi Tionghoa jikalau diamankan oleh Pagar Nusa. Memang, Pagar Nusa tidak mau meminta kompensasi atau pamrih dari etnis Tionghoa. Namun, etnis Tionghoa merasa sungkan apabila tidak memberikan timbal balik pada Pagar Nusa. Makanya, tiap ada acara bulanan, tahunan, serta kegiatan sosial yang dilakukan Pagar Nusa, etnis Tionghoa akan memberi bantuan pendanaan kepada Pagar Nusa.

Selain meminta bantuan Pagar Nusa, etnis Tionghoa juga melakukan strategi yang bersifat simbolik. Yakni, dengan menempelkan gambar atau foto Kiai yang terkenal dan disegani

masyarakat (Islam) di Situbondo. Termasuk juga, menempelkan tulisan di toko dan di rumahnya yang berisi tentang identitas ke-Islaman dan ke-pribumian. Tulisan itu yang ditempelkan di rumah dan tempat usaha mereka antara lain: “Milik Orang Pribumi”, dan “Milik Pribumi Muslim.” Dengan menempelkan gambar Kiai dan tulisan tersebut, etnis Tionghoa berharap keamanan diri dan usahanya tidak diganggu para perusuh serta para penjarah. Situasi ini mirip sekali dengan peristiwa kerusuhan dan kekerasan di tahun 1998 silam, tepat pada saat mahasiswa dan rakyat kecil melakukan gerakan demonstrasi menurunkan penguasa orba. Di Jakarta dan di Solo pada waktu itu banyak terjadi tindak kerusuhan yang berdimensi SARA. Dan sasarannya adalah etnis Tionghoa.

Karena itulah banyak etnis Tionghoa menempelkan tulisan di depan rumah dan tokonya bahwa dirinya adalah orang pribumi dan tergolong muslim (Budiarti, 2007). Hal ini mengartikan bahwa pada situasi konflik, chaos dan anarkisme massal yang bersifat SARA, maka masyarakat Tionghoa memiliki daya tanggap untuk melakukan ‘sterilisasi kekerasan’ yang ditujukan kepada dirinya. Di sisi yang lain, jika kembali dikaji jauh ke dalam prilaku mereka, justru tujuan utama kebanyakan Tionghoa melakukan strategi simbolik dan kultural itu adalah melakukan minimalisasi resiko ekonomi.

Sangat mungkin, terjadinya kerusuhan yang berdimensi SARA itu pun disebabkan lemahnya komonikasi dan interaksi sosial yang terjalin antara Tionghoa dan masyarakat Pribumi. Tapi pasca kerusuhan, interaksi sosial antara etnis Tionghoa (terutama Tionghoa muslim) dengan masyarakat pribumi itu terjalin dengan cukup baik. Terbukti, dalam tiap moment ke-agamaan, seperti puasa, hari raya idul kurban, dllnya, etnis Tionghoa selalu memerikan sumbangan dana pada masyarakat

Muslin di sekitarnya. Bahkan, ada yang memberikan buka puasa dan zakat tahunan terhadap masyarakat pribumi yang ada di sekitarnya. Dalam kegiatan sukuran atau hajatan tertentu pun, etnis Tionghoa terkadang mengundang seorang Kiai atau ustadz. Termasuk memberi bantuan ke pondok pesantren tertentu. Hal ini ditujukan untuk mempererat rasa persaudaraan dan solidaritas diantara kedua belah pihak yang saling berbeda.

Kota Malang:

Kota Lama yang lahir kembali dengan wajah Baru

Aspek Ekonomi. Tidak jauh dari kota ini, ada kecamatan Singosari yang secara administratif menjadi bagian dari Kabupaten Malang. Di Singosari, dalam catatan sejarah terdapat kerajaan Hindu pada abad ke-12. Kerajaan ini kelak menjadi cikal bakal dari kerajaan Majapahit yang terkenal. Situs-situs peninggalan kerajaan ini terserak mulai dari Pandaan hingga Kota Batu. Artinya, Kota Malang termasuk bagian dari wilayah kerajaan ini, meskipun setelah kerajaan Majapahit runtuh wilayah ini tidak tersentuh lagi.

Kota ini dihidupkan kembali justru oleh pemerintah kolonial Belanda, terutama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Potensi alam yang dikembangkan menjadi perkebunan tumbuh pesat pada masa itu, apalagi pemerintah kolonial Belanda menerapkan liberalisasi ekonomi. Perkebunan tidak lagi dikelola oleh pemerintah Belanda, tetapi oleh pihak swasta. Perkebunan dengan berbagai komoditas tumbuh mulai dari Pandaan, Lawang hingga Kota Batu. Kota Malang pun giirannya menjadi pusat pemerintahan dan jasa perdagangan yang melayani kebutuhan perkebunan. Pertumbuhan kota Malang sebagai pusat pemerintahan diwakili oleh bangunan Balai Kota yang

indah. Gambaran Balai Kota Malang meniru kota-kota di Eropa, khususnya Belanda dengan taman dan air mancur di depannya.



Gambar 3
Balai Kota Malang dengan Tugu di depannya.

Udaranya yang dingin (waktu itu), kota itu juga menjadi “*tetirah*” para pegawai *onderneming* daerah sekitarnya. Oleh karenanya, pertumbuhan rumah-rumah kecil dengan pelataran yang agak luas di depannya begitu pesat pada masa itu. Jejak-jejak itu ditulis pada bagian dinding depan sebelah atas dari rumah-rumah tersebut. Lihat saja pemukiman di sekitar Jalan Dieng sekitarnya, rumah-rumah sangat kentara peruntukkan pada masanya.

Di tengah-tengah kota, alun-alun Kota Malang berkembang mengikuti pola kolonial di satu sisi, sisi lain mengikuti pola

kosmologi Jawa yang setengah hati. Kantor Kabupaten terletak di bagian Timur dan Masjid Jamiik di bagian Barat, tetapi Gereja GPIB Jemaat Imanuel tepat bersanding dengan masjid tersebut. Sementara itu, Gereja Katholik Hati Kudus Yesus di Jalan Basuki Rahmat dekat Sarinah. Gereja itu tidak jauh dari Masjid Jamiik dan Kantor Kabupaten. Lebih dari itu, corak perdagangan tidak jauh tempat tersebut. Kampung Pecinan dengan Klentengnya.



Gambar 4
Mall Alun-alun Kota Malang.

Corak multikultur ini tidak lepas dari Kota Malang sebagai salah satu kota impian bagi para pencari peluang ekonomi. Banyaknya warga pendatang yang mencoba mencari peruntungan di Kota Malang mendorong kompetisi yang semakin sengit di bidang ekonomi. Meskipun begitu, sebagian besar sektor perekonomian dikuasai oleh etnis Tionghoa.

Terutama pada sektor bisnis dan perdagangan, kelompok minoritas ini justru menjadi aktor utama. Sedangkan di sisi yang lain, kelompok mayoritas (suku Jawa) mengisi sektor-sektor formal seperti PNS dan pegawai swasta.

Dengan kondisi sosio-ekonomi seperti ini, Kota Malang memiliki kecenderungan yang hampir sama dengan Kota Surabaya. Dominasi perekonomian oleh kelompok minoritas, membawa persepsi bahwa etnis Tionghoa adalah kelompok “kelas atas” dalam struktur piramida masyarakat. Segala sesuatu yang terkait dengan etnis Tionghoa, selalu dikaitkan dengan kehidupan yang mewah, rumah megah dan mobil bermerk dan sebagainya. Hal ini ditunjang juga dengan fakta bahwa pemukiman sebagian besar warga Tionghoa berada di lokasi-lokasi tertentu dan tidak membaaur dengan masyarakat lainnya.

Jarak sosial-ekonomi seperti ini berdasarkan kajian yang pernah dilakukan di beberapa daerah seperti di Tangerang, Medan dan Solo seringkali memunculkan konflik antara etnis Tionghoa dengan kelompok mayoritas. Temuan Sanjatmiko (1999) dalam kasus etnis keturunan Cina dan pribumi di Tangerang, menyimpulkan bahwa faktor renggangnya jarak sosial dan hubungan antar kedua etnis adalah disebabkan oleh : (1) Tidak terjadinya perubahan pola kultur etnis keturunan Cina ke dalam penduduk pribumi, sehingga masih kuatnya *in group feeling* penduduk etnis keturunan Cina terhadap kulturnya; (2) Anggapan kultur etnis keturunan Cina lebih tinggi dari komuniti pribumi; (3) Prasangka stereotipe negatif terhadap penduduk pribumi yang pemalas, bodoh, tidak bisa menggunakan kesempatan baik dsb. Sebaliknya stereotipe penduduk etnis pribumi terhadap etnis keturunan Cina disebut sebagai golongan yang maunya untung sendiri tanpa melihat halal atau haram; (4) Diskriminasi pribumi terhadap etnis keturunan Cina dalam kesempatan

menduduki jajaran aparat desa/pemerintahan; (5) Nilai-nilai dan kekuatan konflik yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan agama dan kesenjangan ekonomi di antara kedua etnis. Berbagai aspek di atas diduga sebagai faktor penyebab terjadinya jarak sosial antara etnis pribumi dan keturunan Cina.

Temuan Tunjung dalam penelitian kerusuhan etnis di Surakarta (1999), menyebutkan bahwa telah terjadi korban yang sangat besar bagi komunitas etnis keturunan Cina, baik secara materiil maupun spirituil. Kalkulasi data pemerintah daerah setempat menunjukkan bahwa kerusakan bangunan ditafsir sekitar 19 milyar rupiah. Ditambah dengan kerusakan dan pembakaran barang-barang dan toko-toko, serta aksi penjarahan mencapai kerugian lebih dari 20 milyar rupiah. Menurutnya faktor kekuasaan (kesewenangan oknum aparat) dapat mempengaruhi ketidakadilan dalam proses perwujudan tata ekonomi, tata sosial, tata politik dan dalam ketidakadilan dalam tata budaya secara struktural. Sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Surabaya dan kota Solo tepatnya bulan Mei 1998 telah terjadi tragedi amuk massa. Peristiwa yang dipertajam dengan isu anti Cina tersebut merupakan indikasi, sebagai bentuk perlawanan dari ketidakpuasan terhadap perkembangan keadaan yang dihadapi oleh warga masyarakat setempat dan sekitarnya.

Hasil penelitian yang senada juga dikemukakan Pelly (1999), dalam kasus etnis keturunan Cina di kota Medan, bahwa kasus amuk massa Mei 1998 bermula dari krisis moneter yang tidak pernah kunjung tuntas. Menurutnya persoalan lain yang menjadi pemicu kerusuhan ialah adanya kesenjangan kaum papan atas (*the haves*) dengan kalangan papan bawah yang merupakan kelompok mayoritas, yang secara tajam menunjukkan perbedaan menyolok. Kesenjangan sosial-ekonomi (jarak

sosial) tersebut disebabkan adanya perbedaan akses terhadap sumber daya dan ekonomi (*economic resources*), rekayasa sosial dan perlakuan diskriminatif pemerintah rezim Orde Baru dalam kesempatan berusaha dan mengembangkan diri. Apalagi kemudian di kota-kota besar termasuk di kota Solo terjadi peningkatan jumlah pengangguran dan tindakan kriminalitas, serta tuntutan masyarakat yang bersifat politis seperti tuntutan pemilu yang demokratis, gerakan kaum mahasiswa dengan semboyan reformasi.

Berbeda dengan fenomena yang terjadi di beberapa daerah tersebut, di Malang konflik fisik antara etnis Tionghoa dengan pribumi (Jawa) tidak/belum pernah terjadi. Namun sebagian besar narasumber tidak memungkiri bahwa dengan konteks sosio-ekonomi yang hampir sama maka potensi itu masih tetap ada. Selama ini kecenderungan munculnya konflik dapat diredam dengan hubungan yang saling menguntungkan antara kelompok minoritas dan mayoritas. Kelompok minoritas yang menguasai sektor perekonomian merekrut pekerja yang berasal dari kelompok mayoritas, sehingga terbangun hubungan saling menguntungkan.

Faktor lain yang juga mendukung terbangunnya hubungan yang harmonis antara etnis Tionghoa dan kelompok masyarakat lainnya adalah adanya komunikasi intensif yang dibangun antara pemuka agama dan tokoh masyarakat bersama aparat melalui FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) dan kegiatan *coffee morning* yang digagas oleh pemerintah kota. Dengan adanya media komunikasi ini, hubungan antar etnis dan agama yang berbeda di Malang dapat diakomodasi melalui kegiatan-kegiatan sosial bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun potensi konflik ada, kerukunan antar etnis dan warga Kota Malang masih terbangun dengan sangat baik.

Aspek Sosial-Budaya. Dari sisi budaya, Malang memiliki tiga sub-kultur, yaitu sub-kultur budaya Jawa Tengahan yang hidup di lereng gunung Kawi, sub-kultur Madura di lereng gunung Arjuna, dan sub-kultur Tengger sisa budaya Majapahit di lereng gunung Bromo-Semeru. Budaya asli Malang ini kemudian bergabung menjadi satu dengan berbagai budaya dan tradisi yang dibawa oleh masyarakat pendatang. Sebagaimana kondisi kota-kota besar di Indonesia, Malang kemudian berkembang sebagai kota pertemuan berbagai budaya, tradisi dan adat istiadat.



Gambar 5
Masjid Jami' Malang

Dari sisi keagamaan, Malang juga memiliki karakteristik yang majemuk. Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Meskipun mayoritas beragama Islam, karakteristik utama masyarakat sangat dipengaruhi dengan kultur mataraman/pe-

dalaman Jawa yang ditandai dengan kecenderungan tertutup/tidak lugas dan berjenjang (Sadewo dan Maliki, 2001)

Etnik masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (Arema) serta menjunjung tinggi kebersamaan dan setia kepada malang. Di kota Malang juga terdapat tempat yang merupakan sarana apresiasi budaya Jawa Timur yaitu Taman Krida Budaya Jawa Timur, di tempat ini sering ditampilkan aneka budaya khas Jawa Timur seperti Ludruk, Ketoprak, Wayang Orang, Wayang Kulit, Reog, Kuda Lumping, Sendra tari, saat ini bertambah kesenian baru yang kian berkembang pesat di kota Malang yaitu kesenian "Bantengan" kesenian ini merupakan hasil dari kreatifitas masyarakat asli malang

Hubungan antar etnik terbangun dengan baik, sikap saling menghormati perbedaan tumbuh dengan baik. Antara kelompok mayoritas dengan kaum pendatang minoritas, seperti: Tionghoa, Madura, dsb muncul kerukunan dan keharmonisan. Misalnya saja pada saat bulan puasa kelompok dari etnis Tionghoa membagi-bagikan sembako kepada mereka yang kurang mampu dan kegiatan ini menjadi salah satu agenda tahunan bagi warga etnis Tionghoa.

Kesadaran hidup bersama dengan berbagai etnis yang berbeda sudah terbangun sangat lama. Hubungan harmonis yang sudah terbangun dengan baik ini juga tercermin dalam struktur Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Malang. FKUB yang didirikan sebagai media dan sarana komunikasi antar umat beragama di Malang ini secara struktural mengakomodasi semua agama. Tidak hanya itu, diharapkan FKUB mampu menjembatani berbagai fragmentasi sosial di masyarakat, sehingga terbangun kehidupan yang harmonis.



Gambar 6
Klenteng Eng An Kiong dekat Alun-alun Malang

Dari segi etnisitas, suku Jawa adalah mayoritas di Kota Malang. Sedangkan kelompok minoritas yang memiliki peranan penting adalah Madura dan Tionghoa. Etnis Tionghoa menguasai perekonomian, khususnya perdagangan dan jasa dalam skala besar, sedangkan etnis Madura di level perdagangan kecil dan sektor informal. Bahasa yang dipakai dalam komunikasi sehari-hari adalah bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran, dengan ciri bahasa *walikan* khas Malang. Artinya bahasa yang diucapkan secara terbalik. Seperti contoh berikut: *arek malang* dituturkan dengan *kera ngalam, singo edan* menjadi *ongis nade* dsb. Kata-kata di atas sering juga masuk dalam bahasa surat kabar. Hal itu dianggap sebagai salah satu identitas kota Malang. Bahasa Jawa Timuran juga muncul di JTV. Di Malang Raya banyak tv lokal seperti Gama TV (Budha), Malang TV, Batu TV, ATV, dan

Mahameru TV. Semuanya menggunakan bahasa Jawa Timuran. Fenomena bahasa *walikan* mulai muncul sekitar tahun 1970-an, akan tetapi menurut beberapa informan bahasa *walikan* mulai muncul sekitar perang kemerdekaan. Bahasa tersebut diduga sebagai bahasa rahasia atau sandi para pejuang kemerdekaan.

Dengan konteks sosial budaya yang relatif majemuk, Kota Malang memiliki potensi konflik sosial yang bersifat laten. Meski tidak pernah muncul dalam bentuk konflik fisik, ketegangan antar agama kerap muncul pada beberapa dimensi kehidupan. Potensi konflik itu dapat dilihat ketika menjelang natal banyak gereja yang dijaga ketat oleh aparat. Disamping itu, kecenderungan untuk tidak hidup membaaur antara suku dan etnis juga memiliki potensi mendorong munculnya konflik.

Namun, fenomena ini tidak dapat digeneralisasi untuk menjelaskan kecenderungan umum hubungan antar etnis dan agama di Malang. Justru ketika terjadi perayaan natal di Kota Malang, banyak kelompok santri, banser dan kelompok masyarakat lainnya yang justru ikut mengamankan di gereja-gereja yang ada di Malang. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang cukup luas dari kelompok mayoritas terhadap minoritas di Malang. Tidak hanya itu, pada saat terjadi tragedi Mei 1998, justru banyak kelompok etnis Tionghoa yang meminta perlindungan kepada tokoh-tokoh agama, Kiai, pondok pesantren. Hal ini menunjukkan tingkat toleransi yang baik antar etnis dan agama.

Di Kota Malang sendiri, etnis Tionghoa terbagi dalam tiga kelompok besar dengan karakteristik dan kecenderungan perilaku yang berbeda. Berdasarkan kajian yang dilakukan sedikitnya terdapat 3 kelompok Tionghoa yang ada di Malang adalah:

Pertama, Tionghoa Belanda. Kelompok ini secara kultur sudah luntur tradisi cina-nya, mereka jika dilihat dari penampilan dan gaya hidupnya sudah berbau eropa/kebarat-baratan. Gaya hidup yang mereka tonjolkan lebih ke arah borjuis, dan suka memamerkan kekayaannya, menggunakan mobil-mobil mewah kemanapun mereka pergi.

Kedua, Etnis Tionghoa Asli (Cina Totok). Kelompok ini lebih dikenal sebagai Tionghoa totok, budaya-budaya Tionghoa masih melekat kuat di antara mereka. Dilihat dari penggunaan bahasa sehari-hari, mereka lebih sering menggunakan bahasa Tionghoa dari pada bahasa Indonesia ataupun Jawa. Sifat nasionalisme dari kelompok ini lebih condong ke nasionalisme dari asal mereka yakni dari Asia Timur.

Ketiga, Tionghoa Indonesia. Kelompok ini berasal dari cina keturunan, dan sebagian dari mereka kurang mengerti kultur cina sebenarnya. Kondisi semacam ini dikarenakan karena mereka sudah berasimilasi dengan budaya-budaya local, bahkan mereka lebih paham budaya masyarakat local dari pada budaya asal mereka. Kelompok Tionghoa Indonesia ini juga ikut dalam andil dalam merebut kemerdekaan Indonesia, dan sifat nasionalisme mereka lebih kuat ke nasionalisme Indonesia.

Diluar tiga klasifikasi tersebut, terdapat satu kelompok etnis Tionghoa yang juga cukup banyak jumlahnya di Kota Malang. Segmen keempat ini adalah kelompok etnis Tionghoa yang beragama Islam dan tergabung dalam Pembina Iman Tauhid Indonesia (PITI). Pada kelompok etnis Tionghoa ini, kecenderungan untuk membaaur dengan kelompok masyarakat yang lain sangat tinggi. Bahkan seakan tidak memiliki batas dan perbedaan dengan kelompok mayoritas (Suku Jawa). Pada

momen-momen tertentu memiliki kegiatan nyata dengan melakukan kegiatan sosial.

Dari aspek hubungan antar etnis, empat klasifikasi etnis Tionghoa tersebut, dapat disederhanakan menjadi dua kelompok besar, yaitu: kelompok yang mampu membaur dan kelompok yang resisten. Kelompok yang mampu membaur dengan etnis yang berbeda adalah mereka yang memiliki kesamaan agama dengan kelompok mayoritas (Islam) dan kelompok Tionghoa Indonesia atau Tionghoa keturunan Indonesia. Dua segmen ini relatif mampu beradaptasi dan diterima dengan baik dikarenakan kesamaan karakter sosial, budaya dan sejarah yang dimiliki. Dengan beragama Islam, mereka dianggap menjadi satu bagian dari persaudaraan dengan muslim yang lain, sedangkan kesamaan sejarah dan kebangsaan Indonesia membantu mereka untuk membangun identitas bersama dengan anak bangsa yang lain.

Kota Madiun:

Kota Jawa Mataraman yang bergerak menjadi Masyarakat Industri

Aspek Ekonomi. Di Kota Madiun terdapat satu perusahaan yang menjadi urat nadi industri Kota Madiun sekaligus penggerak utama roda ekonomi wilayah ini. Perusahaan tersebut adalah PT Industri Kereta Api (PT INKA) yang bergerak di bidang pembuatan alat transportasi kereta api dan kelengkapannya. PT INKA adalah produsen kereta api satu-satunya di Indonesia yang berstatus BUMN yang terbesar baik dari segi investasi maupun jumlah tenaga kerja diantara enam industri besar di kota ini. Industri keret api yang berdiri tahun 1981 ini tidak hanya menghasilkan produk untuk pasaran dalam

negeri, melainkan juga untuk tujuan ekspor ke Malaysia dan Thailand. Kapasitas produksi per tahun menghasilkan di antaranya 300 gerbong barang, 60 kereta penumpang, 40 KRD dan KRL.



Gambar 7
Salah satu Plaza di Kota Madiun. Megah, meninggalkan tradisionalisme Jawa

Industri lain yang menjadi ciri khas Kota Madiun adalah industri makanan (*home industry*) seperti bumbu pecel, kerupuk lempeng, dan brem. Begitu identiknya Madiun dengan makanan khas ini sampai-sampai Madiun dikenal dengan sebutan Kota Brem dan pecel Madiun terkenal hingga ke luar kota. Selain industri, kontributor lain yang tak kalah penting dalam menggerakkan ekonomi Kota Madiun adalah sub sektor

perdagangan, Maraknya perdagangan ditandai dengan meningkatnya jumlah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) maupun SIUP, khususnya perusahaan kecil yang dikeluarkan oleh Disperindag Kota Madiun.

Hampir sama dengan kondisi perekonomian di Kota Malang, perekonomian Kota Madiun juga sebagian besar dikendalikan oleh etnis Tionghoa. Terutama di sektor perdagangan barang dan jasa, sedangkan kelompok mayoritas (orang Jawa) mengisi sektor-sektor formal seperti PNS, pegawai perkebunan, dan PT Inka. Kalaupun ada masyarakat Jawa yang menjadi pedagang, cenderung pada skala usaha kecil dan menengah. Situasi kota yang tidak sehiruk pikuk kota-kota lain di Jawa Timur menggambarkan denyut perekonomian berjalan dalam tempo yang sedikit lamban. Sebagian perkembangan usaha dan sektor riil justru berasal dari kelompok pendatang dan minoritas. Sementara itu, kelompok masyarakat asli cenderung menghargai profesi pegawai negeri dan pegawai formal dalam instansi-instansi swasta. Hal ini sejalan dengan kultur masyarakat mataraman yang menempatkan kelompok priyayi/birokrat pada posisi yang relative tinggi.

Dominasi di bidang perekonomian tidak terlalu menjadi permasalahan karena sudah terbangun kesadaran hidup bersama yang sangat lama. Di benak masyarakat Madiun sudah terdapat pemahaman bahwa etnis Tionghoa sudah sejak dahulu menjadi pedagang, sehingga wajar jika pada saat ini juga masih mengendalikan ekonomi. Sedangkan bagi kelompok mayoritas atau pribumi hal ini tidak terlalu penting. Selama semua memahami posisinya dalam struktur masyarakat, maka harmonisasi kehidupan pasti akan terwujud. Kelompok etnis Tionghoa yang memiliki usaha membutuhkan tenaga kerja dari kelompok pribumi. Di sisi yang lain, keterbatasan sektor-sektor formal

dalam menyerap tenaga kerja dapat diimbangi dengan sektor perdagangan yang dikelola oleh sebagian esar etnis Tionghoa. Kondisi ini menjadikan semua pihak dapat menerima keuntungan.

Kondisi yang demikian juga membawa harmonisasi hubungan kerja antara pemilik usaha dengan pekerjanya. Dari sisi ini tidak ada segregasi antara pemilik modal dengan pekerja. Semua terangkai dalam sebuah sistem yang saling membutuhkan. Jika ditinjau dari sisi kepemilikan tanah serta kecenderungan lokasi tempat tinggal di Madiun relative tidak bermasalah. Kecenderungan lokasi tempat tinggal, meski masih ada pemusatan-pemusatan tertentu di beberapa titik, seperti etnis Tionghoa di jalan Barito dsb, namun perkembangannya sudah semakin membaik.

Aspek Sosial-Budaya. Masyarakat Madiun secara kultural masuk dalam kategori Jawa Mataraman. Jawa Mataraman memiliki produk kebudayaan yang tidak jauh berbeda dari komunitas Jawa yang tinggal di Surakarta dan Yogyakarta. Masyarakat Jawa Mataraman mempunyai pola kehidupan sehari-hari sebagaimana pola kehidupan orang Jawa pada umumnya. Pola bahasa Jawa yang digunakan, meskipun tidak sehalus masyarakat Surakarta dan Yogyakarta, mendekati kehalusan dengan masyarakat Jawa yang terpengaruh kerajaan Mataram di Yogyakarta. Begitu pula pola cocok tanam dan sistem sosial yang dianut sebagaimana pola masyarakat Surakarta dan Yogyakarta. Pola cocok tanam dan pola hidup di pedalaman Jawa Timur, disebagian besar, memberi warna budaya Mataraman tersendiri bagi masyarakat ini. Sedangkan selera berkesenian masyarakat ini sama dengan selera berkesenian masyarakat Jawa pada umumnya. Dalam masyarakat Jawa Mataraman ini banyak jenis kesenian seperti ketoprak,

wayang purwa, campur sari, tayub, wayang orang, dan berbagai tari yang berkaitan dengan keraton seperti tari Bedoyo Keraton.

Dari sisi sosial, ciri khas dari masyarakat Mataraman itu adalah masyarakat yang patuh terhadap semua peraturan yang ada. Selain dari ketaatan yang ada tadi, masyarakat Mataraman bila tidak terusik atau tidak terbina akan menjadi masyarakat yang apatis.

Meskipun begitu kondisi sosial masyarakat di Madiun cukup beragam, ada etnis tionghoa dan arab selain orang pribumi, penganut agamanya juga beragam selain Islam sebagai yang dominan juga ada kristen dan konghucu. Semuanya hidup berdampingan dengan baik, tidak ada konflik yang terjadi di masyarakat, di masyarakat bisa tercipta kerukunan dan toleransi yang baik. Kesejahteraan sosial masyarakat juga cukup baik di kota, banyaknya lapangan kerja baru dalam sektor perdagangan dan industri mampu menyedot tenaga kerja cukup banyak sehingga membuat kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

Di dalam masyarakat relatif tidak terjadi pengelompokan, semua hidup membaaur, meskipun etnis dan agama berbeda namun sehari-hari masyarakat dapat berinteraksi dengan baik, banyak yang tempat tinggalnya berdampingan dengan orang yang berbeda etnis dan agama, karena disini masyarakatnya sudah bisa terbuka dan membaaur dengan kelompok lain dengan baik. Kelompok yang mayoritas disini adalah orang Jawa dan orang Islam, sedangkan yang minoritas adalah orang tionghoa dan arab serta orang yang beragama Konghucu, selain itu di madiun juga terkenal sebagai kota pensiunan, karena disini banyak sekali orang-orang pensiunan. Pola pemukiman masyarakat menyebar di kampung-kampung, sebagian besar di kota dan sebagian lagi di pinggiran kota, perkampungan disini cukup

padat, warganya terdiri dari berbagai kelompok, ada yang Jawa, Madura, Tionghoa, kemudian agamanya juga ada yang Islam, Kristen, Konghucu, semua hidup berdampingan dengan rukun.

Secara kultural masyarakat Madiun hanya memiliki kebudayaan atau kesenian lokal yang bernama *dongkrek*, yakni sejenis tarian yang menggunakan bambu lalu dibentuk seperti *ondel-ondel* yang dimainkan oleh orang, atau juga ada budaya *mendhem* di masyarakat sudah marak sekali, namun tidak pernah ada pentas atau acara yang menampilkan kebudayaan atau kesenian daerah setempat, dalam acara-acara yang diadakan oleh pemerintah juga tidak pernah ditampilkan, termasuk juga ketika perayaan 17 Agustus tiap tahunnya.

Madiun juga memiliki budaya dan tradisi seni bela diri yang kuat, terwujud dalam dua organisasi besar yakni PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dan Winongo. Pola kaderisasi dan doktrin ajaran yang sangat kuat memunculkan loyalitas yang terkadang melampaui batas. Sayangnya, loyalitas dan kaderisasi ini melahirkan semangat *in-group* yang terlalu kuat. Akibatnya, tidak jarang dua perkumpulan ini terlibat dalam konflik terbuka.

Meski agama Islam dianut oleh mayoritas penduduk Madiun, namun perilaku keagamaan masyarakat cenderung tidak fanatik. Perilaku keagamaan sebagian besar masyarakat biasa saja, tidak sampai ada yang fanatik, atau biasa dikatakan sebagai orang abangan yang memang banyak di wilayah Mataraman.

Kecenderungan ini tidak hanya terjadi pada kelompok Islam, namun juga agama-agama yang lain. Pada tataran tertentu hal ini justru mendorong terciptanya hubungan baik antara umat beragama. Ketegangan dengan dasar agama juga sangat jarang sekali muncul, dikarenakan kuatnya paham nasionalis di Madiun. Di samping itu keberadaan Forum Komunikasi Umat

Beragama juga mendorong terbangunnya komunikasi dan kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Seperti yang disampaikan

Keharmonisan ini tercermin juga pada beberapa perayaan hari besar keagamaan. Di setiap hari ulang tahun Tri Dharma misalnya selalu diadakan kegiatan jalan sehat yang justru pesertanya lebih banyak orang Jawa. Biasanya juga pada pertengahan bulan puasa Tridharma membagi-bagikan sembako bagi orang miskin di Kota Madiun.

BAB IV

ETNIS TIONGHOA DALAM LINGKARAN POLITIK

Menghindari Politik untuk menggapai Keuntungan Ekonomi (Kasus di Surabaya)

Merupakan ciri kehidupan sosial, bahwa di setiap masyarakat selalu ada figur ataupun tokoh masyarakat yang dijadikan panutan di dalam bersikap dan berperilaku masyarakatnya. Karena, figur ataupun tokoh masyarakat ini dianggap memiliki suatu kelebihan tertentu dibandingkan masyarakat pada umumnya. Ada beragam kelebihan yang melekat dan dilekatkan dalam kehidupan figur masyarakat tersebut. Antara lain kharismatik, kekuatan supranatural, tubuh, intelektual, modal ekonomis, pendidikan, serta nilai-nilai patriotisme (Weber dalam Ritzer, 2003; Foucault, 1976). Masyarakat menganggap bahwa kehadiran figur ataupun tokoh tersebut bisa memberikan sebuah harapan perbaikan dan kemajuan berbagai aspek kehidupan yang terkontaminasi oleh nilai-nilai patologis dan anomie.

Tentu tidak hanya di dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan politik pun, kehadiran figur atau tokoh panutan memang terkadang tidak bisa dihindari, memiliki peran yang urgen. Karena politik berurusan dengan pengaturan kekuasaan dan

proses komunikasi massa yang sinergis untuk menghasilkan kehidupan yang demokratis dan humanis. Dengan demikian, tanpa adanya figur politik maka sangat mungkin politik hanya akan menjadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri (Hannah Arendt, 2005). Persoalannya kini bagaimana masyarakat menentukan figur politik tersebut? Dalam masyarakat Surabaya, yang sebagian besar adalah masyarakatnya agamis-tradisional, maka perilaku politiknya pada umumnya merujuk pada tokoh panutan politiknya secara irasional.

Artinya, tindakan politik mereka lebih mengutamakan pada perasaan bukan pada pertimbangan untung-rugi atau melihat kekurangan-kelebihan si tokoh tersebut (Weber dalam Jhonson, 1989). Implikasinya, ketika mereka tak mengindahkan pada apa yang menjadi tuntutan sang tokoh itu, maka ada perasaan bersalah dan 'berdosa' dari sang konstituen (pengikutnya). Bahkan, sikap fanatik seperti ini justru membuat pengikutnya rela mengorbankan nyawanya jika sang tokoh mereka itu dihina.

Jika golongan mayoritas di Surabaya itu lebih bersifat irasional dalam perilaku politik yang berdimensi dukungan kepada figur politiknya, maka golongan minoritas seperti etnis Tionghoa justru perilaku politiknya lebih rasional. Rasionalitas politik ini bukanlah hal yang baru lagi di dalam politik etnis Tionghoa. Sebab, adanya penetrasi prinsip bisnis yang mereka geluti sekian lamanya. Sehingga, pola pikir bisnis itu pun dijadikan pola pikir dalam berpolitik. Karena itu, tidak heran jika tokoh panutan etnis Tionghoa pada umumnya lebih melihat kompetensi, kapabilitas dan sejarah dari sang tokoh bersangkutan.

Setidaknya ada dua tokoh politik yang bagi sebagian besar etnis Tionghoa di Surabaya menjadi layak untuk diapresiasi. Yakni, Megawati dan Gus Dur. Megawati dianggap pantas dijadikan

tokoh panutan karena ia merupakan anak Ir. Soekarno. Sebagaimana diketahui bahwa peran Ir. Soekarno sangatlah besar bagi kehidupan pluralitas dan kemajemukan etnis di negeri ini. Akar historis inilah yang kemudian menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat Tionghoa kebanyakan guna menjadikan Megawati sebagai figur politiknya. Sementara itu, Gus Dur sendiri dianggap sebagai figur politik oleh kebanyakan etnis Tionghoa karena dialah yang telah memberikan kontribusi besar bagi pengakuan konghucu sebagai agama 'legal' di Indonesia dan juga mengikis adanya perbedaan warga keturunan dan pribumi. Hal inilah setidaknya yang diungkapkan Syaifuddin Zaini dan Simon Filantropy (50 thn., tokoh Gereja Kristen Indonesia):

“Kalau dari warga PDI-P tokoh panutan bagi mereka adalah Megawati, hal ini tidak terlepas dari bubungan emosional yang sangat dekat dengan para pendukungnya, selain itu factor dari ayahnya Ir. Soekarno yang merupakan proklamator, pendiri bangsa ... sementara Gus Dur itu adalah salah seorang mantan Presiden RI yang berjasa pada Tionghoa, khususnya masalah status kewarganegaraan yang tak ada lagi pembedaan antara warga keturunan dan pribumi”

Karena lebih rasionalitas dalam menentukan figur politiknya, maka Tionghoa di Surabaya tidak terjebak pada sikap fanatisme yang berlebihan. Mereka tak terlalu mau ambil pusing jika tokoh atau figur politiknya itu dihina dan dilecehkan. Mereka juga tak mau mengorbankan nyawanya demi membela figur politiknya. Karena, bagi mereka urusan bisnis dan menjaga usahanya dari berbagai ketidakamanan dan tindak kekerasan akibat suhu politik yang memanas merupakan suatu hal yang lebih penting daripada membela mati-matian figur politiknya yang nantinya hasilnya akan sia-sia belaka bagi perkembangan usaha/bisnis mereka.

Hal itu yang lantas membuat kedekatan emosional antara etnis Tionghoa dengan para pengikut fanatik tokoh politik tersebut kurang terjalin dengan baik. Sehingga, banyak kalangan masyarakat itu menganggap bahwa etnis Tionghoa tidak memiliki tokoh panutan dalam politik. Tokoh atau figur panutan politik mereka tak bisa diprediksi secara valid, karena yang menjadi prioritas dalam perilaku politik mereka adalah bertitik tolak pada kaidah rasionalitas-ekonomis. Jika pun ditemukan ada sebagian etnis Tionghoa yang memiliki tokoh panutan, toh sifatnya lebih terfragmentasi.

Meskipun kebanyakan etnis Tionghoa kurang memiliki kedekatan emosional dengan figur panutan politiknya, tapi mereka lebih memiliki akses politik yang besar jika dibandingkan dengan masyarakat mayoritas pada umumnya. Golongan Tionghoa bisa dengan mudah membangun komunikasi dengan berbagai penguasa di Surabaya. Sementara masyarakat kebanyakan, apalagi masyarakat mayoritas kelas bawah justru sulit menjalin komunikasi dengan penguasanya. Salah satu penyebabnya kebanyakan Tionghoa dapat mengakses politik itu karena sumber modal ekonomis dan memiliki motivasi untuk mengamankan jaringan dan bisnis mereka sendiri. Dengan kata lain, kehidupan usaha Tionghoa akan berjalan kondusif dan dinamis bila ada perlindungan dari pemegang kekuasaan.

Namun demikian, yang patut ditegaskan bahwa Tionghoa yang dapat mengakses politik dan menjalin komunikasi dengan kekuasaan itu adalah golongan Tionghoa yang kaya saja. Sementara, Tionghoa yang tingkat ekonominya tergolong menengah ke bawah, juga akan sulit akses politiknya. Karena itulah, tidak heran jika ada yang mengatakan bahwa Tionghoa itu merupakan salah satu penyandang dana terbesar seseorang yang hendak menjadi pemimpin daerah (baik bupati, gubernur

ataupun presiden). Dengan memberikan suntikan dana itu, maka harapannya warga atau etnis Tionghoa itu bisa dengan mudah dimuluskan kepentingan ekonominya jika sang kandidat itu terpilih menjadi kepala daerah.

Perilaku politik yang bersifat pragmatisme dan oportunisme etnis Tionghoa itu pun terbawa dan berpengaruh dalam partisipasi politiknya. Hal ini bisa terlihat dalam pola pemilihan parpol (partai politik) di dalam ajang pemilu. Di Surabaya khususnya, dan Jawa Timur pada umumnya, merupakan basis PDI-P dan PKB. Kedua parpol memperoleh dukungan yang besar sekali di Surabaya itu karenan sebagian besar simpatisan dan pengikut fanatiknya yang berasal dari sebagian besar masyarakat mayoritas di daerah Surabaya, seperti Jawa dan Madura. Akan tetapi, bagi masyarakat Tionghoa secara umum, pemilihan dan dukungan terhadap parpol lebih ditujukan pada parpol-parpol besar dan pemenang pemilu.

Memang benar, bahwa masyarakat dan etnis Tionghoa memiliki representasi ideologi yang diakomodasi oleh parpol bernama PDS. Sehingga, keberadaan PDS itu bisa menjadi wadah politik bagi masyarakat Tionghoa di pentas pemilu. Akan tetapi, dalam realitasnya dukungan suara yang diberikan kepada PDS hanya dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang berasal dari kalangan bawah saja. Sementara, masyarakat Tionghoa yang tergolong kelas menengah ke atas, pilihan parpolnya justru ditujukan pada parpol besar pemenang pemilu.

Tentu, alasannya adalah alasan ekonomis, yakni mengamankan kehidupan bisnis dan perdagangan. Ironisnya, terkadang mereka tidak terlibat aktif ketika ajang pemilu. Yakni, mereka hanya memberikan dukungan dana saja dan di beberapa daerah terutama pada saat pemilihan umum, jarang dari mereka yang

hadir di tempat pemilihan suara (TPS). Di perumahan elite dan prestisius yang menjadi konsentrasi tempat tinggal golongan Tionghoa menengah ke atas justru yang banyak datang ke TPS itu adalah para pembantu mereka.

Sekalipun demikian, dibandingkan pentas pemilu pada masa orba, partisipasi politik masyarakat Tionghoa lebih baik di masa reformasi sekarang ini. Karena, pada orba itu, ada kecelakaan sejarah kemanusiaan yang mengisi kehidupan masyarakat Tionghoa. Yakni, pada medio '66, masyarakat Tionghoa dianggap sebagai pengikut PKI. Tuduhan yang dilabelkan kepada masyarakat Tionghoa itu dikarenakan gerakan PKI salah satunya dilandasi oleh gerakan masyarakat tani di negeri Cina. Jadi, warga Tionghoa di Indonesia itu juga dianggap terlibat dengan gerakan komunisme di Cina. Padahal, tuduhan seperti ini jelas a-historis. Tetapi, kekuasaan yang mutlak di tangan penguasa orba membuat tuduhan tersebut menjadi tidak bisa diurai lagi. Akibatnya, banyak masyarakat Tionghoa yang terbunuh oleh senapan TNI. Dari sejarah itulah, kemudian masyarakat Tionghoa mulai bungkam terhadap partisipasi politik. Mereka tidak banyak terlibat dalam laga pemilu pada masa orba. Sejarah kelam kemanusiaan itu pun ditambah dengan adanya adanya anti-cina di sejumlah daerah di Indonesia, yakni Jakarta dan Solo di tahun 1998 silam. Tragedi kemanusiaan inilah menambah daftar panjang praktek kekerasan berdimensi politik dari golongan pribumi terhadap golongan minoritas Tionghoa.

Namun pasca '98, setelah Orba itu tumbang dan kemudian menjadi pendulum proses demokratisasi di Indonesia, maka golongan minoritas Tionghoa mulai berani mengekspresikan diri dalam medan politik. Bahkan, ada juga yang sudah berani untuk mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif ataupun kepala daerah. Terlebih lagi di daerah Surabaya, pada ajang pemilu

belum pernah terdengar kabar adanya praktek kekerasan terhadap Tionghoa. Hanya saja, seperti kata pepatah kebiasaan lama sulit diubah (*old way never change*). Partisipasi politik yang mereka jalankan di dalam era reformasi dan demokratisasi ini lebih didasarkan pada prinsip bisnis, pragmatis dan oportunistis.

Berharap dapat berpartisipasi politik di Tengah Iklim Politik yang Berubah (Kasus Tuban)

Jika di Kota Solo, konflik etnis yang melibatkan Tionghoa seringkali terjadi, maka Di Tuban konflik sosial antar etnis yang melibatkan etnis Tionghoa versus Jawa tidak pernah terjadi. Meskipun gambaran masyarakat di Tuban itu cukup memberikan warna kemajemukan etnis di Tuban. Sejak lama, masyarakat Tionghoa Tuban selalu membaaur dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya meskipun masih ada pemukiman Pecinan yang mayoritas penghuninya adalah Tionghoa. Selain itu, bahasa yang dipakai sebagian besar masyarakat Tionghoa adalah bahasa Jawa akibat berbaurnya masyarakat Tionghoa dan Jawa.

Sejak reformasi, memang telah terjadi perubahan yang cukup radikal terkait dengan eksistensi masyarakat Tionghoa di seluruh Indonesia. Mulai dari pengadaan hari libur nasional untuk memperingati Hari Imlek, kebebasan merayakan kepercayaan dan adat isiadat Tionghoa seperti pertunjukkan barongsai, dihapuskannya SKBRI, diakuinya agama Konghucu, sampai penerbitan media massa berbahasa Mandarin. Ini, tentu saja awal yang baik bagi keberadaan masyarakat Tionghoa, tidak terkecuali di Tuban. Namun demikian, partisipasi politik masyarakat Tionghoa masih dirasa sangat minim, meskipun sejak reformasi kegiatan sosial politik masyarakat Tionghoa mulai terlihat di beberapa organisasi sosial kemasyarakatan

termasuk menjadi pengurus partai politik. Menurut Supriyadi Agusjaya, partisipasi politik masyarakat Tionghoa masih sangat terbatas. *“...Etnis minoritas cina tidak banyak mengambil peran di dalam pengambilan keputusan dan pembangunan, mereka lebih suka berbisnis dan membangun perekonomiannya, sehingga di luar hal tersebut mereka tidak begitu berperan, cenderung pasif...”*

Tidak dapat dipungkiri, bahwa sejak reformasi 1998 memunculkan pemusatan kultur dan penguatan identitas Tionghoa. Kondisi ini mendorong masuknya masyarakat Tionghoa ke kancah politik. Harapan munculnya tokoh Tionghoa itu untuk menduduki jabatan eksekutif pun terbuka lebar ketika pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Di Tuban misalnya, pada pemilihan kepala daerah Tahun 2004 terdapat Calon Bupati bernama Go Tjong Ping yang menggunakan kendaraan partai politik PDI-P. Selain itu, kiprah politik masyarakat Tionghoa terlihat dengan berdirinya organisasi-organisasi sosial yang beranggotakan Tionghoa seperti Forum Komunikasi Kerukunan Kemanusiaan (FK3).

FK3 merupakan organisasi sosial yang diprakarsai pemuda-pemuda Nadlatul Ulama (NU) yang diilhami dari pemikiran Gus Dur. Anggotanya berasal dari berbagai unsur, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Tujuan berdirinya FK3 merupakan salah satu rangkaian upaya pencegahan konflik antar etnis yang cukup rentan pasca reformasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa terbukanya kran demokrasi di Indonesia diawali dengan isu anti Tionghoa. Ini cukup meresahkan bagi masyarakat Tionghoa di Tuban.

Secara ekonomi, sosial, dan budaya, masyarakat Tionghoa Tuban telah terbebas dari berbagai bentuk diskriminasi. Bahkan saat ini bermunculan partai-partai politik dan Lembaga Swadaya

Masyarakat beranggotakan Etnis Tionghoa. Misalnya pada tingkat nasional, kelahiran Partai Tionghoa Indonesia (PTI) sebagai partai Tionghoa yang mendapat 1 juta suara pada pemilu 1999 menjadi sebuah pertanda baru bagi keterlibatan politik etnis Tionghoa. Namun, bagi sebagai orang lahirnya partai politik Tionghoa ini menambah sifat-sifat eksklusivisme orang-orang Tionghoa.

Kehadiran PTI ternyata tak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat Tionghoa secara umum. Karena, mereka memilih untuk meleburkan diri dengan partai-partai nasionalis yang memiliki anggota dari berbagai kalangan. Berdasarkan pada hasil survei yang dilakukan Tempo menjelang Pemilu '99 menunjukkan keberagaman etnis Tionghoa di dalam memilih partai politik. Tercatat sebesar 70% responden memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 36% memilih Partai Amanat Nasional (PAN), 24% Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI), 15% memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan 13% memilih Golongan Karya (Golkar).

Mayoritas orang Tionghoa memilih PDIP karena ada dua faktor. *Pertama*, PDIP mempunyai citra sebagai partai nasionalis sekuler yang dianggap tidak akan memusuhi Tionghoa. *Kedua*, di dalam struktur kepengurusan PDIP Pusat, terdapat tokoh Tionghoa bernama Kwik Kian Gie yang menarik orang-orang Tionghoa ini memilih PDIP. (Leo, 2002:239-240). Sedangkan, pada waktu Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kota Tuban, disinyalir sebagian etnis Tionghoa memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena kagum akan tokoh PKB yaitu Abdurrahman Wahid (Nike, 2006:55).

Menurut sumber, belum ada angka pasti dukungan masyarakat Tionghoa dalam menyalurkan aspirasi politiknya melalui parpol.

Diperkirakan ada 6.000 warga keturunan Tionghoa dewasa, aspirasi politiknya disalurkan ke PDIP 60%, PKB 30%, dan partai Golkar 10%. Persebaran masyarakat Tionghoa di Tuban hampir di seluruh kecamatan (ada 20 kecamatan) kecuali di Kecamatan Senori. Dan, selama ini warga keturunan Tionghoa pun dapat diterima dan berbaur cukup baik dengan warga setempat.

Berpartisipasinya Go Tjong Ping yang mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati melalui PDIP (meski akhirnya kalah), menandakan bahwa masyarakat Tionghoa Tuban ingin menunjukkan konsistensinya dengan isu pembebasan diskriminasi etnis di masa lalu dan ketionghoannya hadir apa adanya sebagai kesetaraan dengan sesama etnis lain di Indonesia.

Masyarakat Tionghoa itu bisa dikatakan tidak mempunyai wilayah ruang sosial budaya yang spesifik di wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat Tionghoa tersebar di seluruh Indonesia. Pecinan pun belum bisa dikatakan sebagai wilayah sosial budaya, karena hanya sebagian kecil dari ruang sosial budaya Tionghoa yang dilingkupi oleh budaya besarnya seperti Jawa, Sunda, atau Batak. (Stevanus, 2008).

Go Tjong Ping adalah seorang aktivis parpol yang mencalonkan dirinya sebagai Calon Wakil Bupati. Pencalonan ini bukanlah karena ketionghoannya, tetapi karena kiprahnya selama ini di PDIP. Akan sangat berbahanya, apabila seorang Tionghoa maju ke kancah pemilihan kepala daerah dengan bekal semata-mata karena dirinya Tionghoa, karena ini dapat menjadi bumerang bagi terjadinya konflik anti etnis.

Langkah terbaik kalangan Tionghoa adalah membuka diri kepada semua pintu yang bisa dimasuki di dalam pemilihan kepala daerah. Maju bukanlah karena faktor Tionghoanya, tetapi

karena memiliki kemampuan, pengalaman, dan basis massa yang teruji dalam pergaulan politik lokal yang ada. Meskipun seorang Tionghoa tidak boleh dilihat bahwa mereka berkiprah di politik karena representasi kepentingan Tionghoa.

Di Tuban, partisipasi politik masyarakat Tionghoa memang tak dapat dipungkiri. Selain Go Tjong Ping, ada Tan Tjoan Hong yang menjadi wakil bendahara PKB, Ie Kim Hung yang menjadi pengurus PKB Kecamatan Soko, Go Swie Tong yang menjadi bendahara PDIP, Tan Tjwoan Siek yang didaulat menjadi wakil ketua bidang tani dan nelayan dan ada Bhe Han Sing yang menjadi bendahara PDIP Kecamatan Tambakboyo. Dan saat ini, Go Tjong Ping menjadi Wakil Ketua DPRD Tuban dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP. Tetapi sampai saat ini, belum ada masyarakat Tionghoa Tuban yang duduk di kursi pemerintahan.

Partisipasi politik masyarakat Tionghoa melalui Pemilihan Kepala Daerah di Tuban menyisakan sebuah cerita tentang kecemasan masyarakat Tuban akan konflik antar etnik. Amuk massa di Tuban yang terjadi pada tanggal 29 April 2006 memberikan rasa khawatir dan cemas khususnya di kalangan masyarakat Tionghoa. Kekalahan yang di kubu Noor Nahar - Go Tjong Ping membuat basis massa pasangan ini merusak aset milik Heany Relawati yang dinyatakan menang sebagai Bupati Terpilih Tuban.

Kejadian ini berawal dari rasa tidak puas akan hasil perolehan suara yang dimenangkan oleh pasangan yang dijagokan oleh Golkar yaitu Heany Relawati-Lilik Soehardjono. Massa pendukung pasangan Noor Nahar-Go Tjong Ping yang dijagokan PDIP mengamuk, membakar dan merusak kantor KPUD Tuban serta aset pribadi milik Heany yang saat itu masih

menjabat sebagai Bupati Tuban. Isu SARA muncul karena Go Tjong Ping yang dijagokan PDIP mendampingi Noor Nahar dari PKB adalah warga keturunan Tionghoa. Warga keturunan Tionghoa di Tuban pun menjadi cemas karena adanya teror akan ada aksi balasan khususnya untuk masyarakat Tionghoa Tuban.

Kerusuhan amuk massa ini merupakan kerusuhan pertama kali yang terjadi di Tuban. Hal ini menjadi suatu bumerang tersendiri bagi keberadaan Tionghoa Tuban karena adanya himbuan untuk menutup toko-toko yang sebagian besar dimiliki oleh warga keturunan Tionghoa. Tetapi kekhawatiran akan terjadi kerusuhan anti Tionghoa tidak terjadi. Karena pada dasarnya amuk massa yang terjadi akibat politik bukan isu SARA.

Tidak terjadinya kerusuhan anti Tionghoa itu akibat sudah terjalinnya hubungan baik di antara Tionghoa dengan masyarakat setempat. Adanya kebiasaan masyarakat Tuban baik dari kalangan Jawa, Arab, maupun Tionghoa untuk minum tuak (minuman khas Tuban dari Siwalan yang difementasi) tiap hari menjelang malam di perempatan-perempatan jalan, mengindikasikan hubungan yang terjalin diantara etnis sangat baik.

Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga sosial politik yang ada di Tuban juga mendukung terciptanya keharmonisan di dalam hubungan antar etnis di Tuban. Hal ini dapat meminimalisir keberadaan konflik sosial akibat isu anti etnis tertentu. Keberadaan tokoh masyarakat juga dapat menjadi penengah dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan masyarakat antar etnis. Meskipun dirasakan masih sangat kurang peran tokoh masyarakat di Tuban.

Berpartisipasi sebagai bentuk kesembuhan dari pengalaman buruk (Kasus Situbondo)

Sebagai kota yang mayoritas masyarakatnya sangat kental dengan nilai-nilai ke-Islamannya, maka menjadi wajar jika kekuatan parpol di kota ini didominasi oleh parpol berasaskan Islam. Pada tahun 2004 lalu misalnya, PKB meraih 23 kursi di DPRD, Golkar meraih 4 kursi, PPP meraih 12 kursi, PDIP 6 kursi dan Demokrat 2 kursi. Itu menunjukkan bahwa parpol nasionalis seperti PDIP belum memiliki dukungan suara yang mayoritas di dalam masyarakat Situbondo. Hal ini disebabkan kebanyakan masyarakat Islam memiliki kecenderungan memilih berdasarkan pilihan dari figur politiknya seperti Kiai. Jika Kiai meminta memilih parpol hijau, maka masyarakat Islam pun kebanyakan akan cenderung memilih parpol hijau tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Martin:

“Mengingat masyarakat Situbondo itu adalah mayoritas Islam, maka lebih memilih partai berazas islam daripada berazaskan nasionalis. Masyarakat yang demikian cenderung mengikuti apa yang dikatakan oleh patronnya. Patron di sini yaitu kyai. Jadi, semisal apa yang dikatakan kyai hijau, mereka pun akan memilih hijau dalam perilaku politiknya”

Namun, masyarakat Tionghoa pada umumnya di kota Situbondo justru cenderung memilih parpol nasionalis seperti PDIP. Menurut mereka, parpol nasionalis seperti PDIP ini berpotensi menjadi parpol besar dan mendulang banyak suara nantinya. Bahkan, lebih dari itu, menjadi simpatisan PDIP berarti tidak terikat pada patron atau figur politiknya. Artinya, peluang otonomi politiknya cenderung lebih besar dibandingkan dengan menjadi simpatisan parpol berasaskan Islam. Akan tetapi, sebagai masyarakat yang kental dengan latar belakang bisnisnya, maka dukungan masyarakat Tionghoa terhadap PDIP ini juga tak lepas dari kalkulasi untung-rugi.

Betapa tidak, untuk mengajak masyarakat Tionghoa menjadi simpatisan parpol nasionalis ini tidaklah mudah. Mereka perlu dibujuk dan juga diiming-imingi dengan keuntungan bisnis. Yakni, dengan cara mengarahkan seseorang ke toko atau tempat usaha orang Tionghoa jika dia membutuhkan barang dagangan. Ataupun dengan memberikan janji keamanan bisnisnya di Situbondo dari berbagai macam gangguan (selama gangguan itu bisa diatasi). Sulit memang, tapi beginilah karakteristik etnis Tionghoa pada umumnya di dalam perilaku politiknya. Ini seperti yang dikatakan oleh Sudarsono, pengurus PDIP:

“Mendekati etnis Cina untuk ikut serta dalam proses politik itu tidaklah mudah. Kendala yang muncul karena etnis Cina sering menggunakan pertimbangan untung rugi dalam menentukan sikap politiknya. Karena itulah, Pendekatan yang digunakan adalah persuasif, salah satu taktiknya adalah dengan pendekatan segi pertemanan baik yang disebabkan secara perseorangan atau karena bisnis/dagang. Contohnya mengarahkan seorang konsumen apabila membutuhkan suatu barang diarahkan ke toko milik etnis Cina yang menjual barang, yang dicari konsumen itu. Pendekatan lain adalah, pada waktu ajang kampanye pemilu tingkat nasional, tentunya dengan memberi janji kampanye keamanan dalam berbisnis dan berinvestasi”

Meski perilaku politik mereka (Tionghoa) bersifat pragmatis, namun dalam aspek partisipasi politiknya bisa terbilang cukup baik. Ini terlihat dari keterlibatan mereka untuk menjadi pengurus dan caleg dari perpol tertentu. Pada tahun 2000-2005 di PDIP terdapat sejumlah etnis Tionghoa yang menjadi pengurusnya. Bahkan ada pula yang mencalonkan diri menjadi caleg pada tahun 2004 silam. Hanya saja, pada periode kepengurusan 2005-2010, pengurus parpol PDIP dari etnis Tionghoa justru semakin menyusut dan mulai tak ada lagi.

Setidaknya, ada dua alasan yang bisa mengkaji menyusutnya etnis Tionghoa di dalam kepengurusan internal parpol itu. Pertama, persyaratan yang berat, namun parpol tersebut tak dapat memberi keuntungan bagi mereka. Kedua, berkurangnya para pemilih dan pendukung caleg dari etnis Tionghoa. Hal ini disebabkan, banyaknya kaum Tionghoa sendiri yang mulai bersikap apatis terhadap politik karena para figur politiknya bisanya hanya memberi janji, tapi tak pernah terealisasi.

Selain banyaknya etnis Tionghoa yang aktif pada kepengurusan parpol, partisipasi politik mereka pun dapat dilihat dari aspek keikutsertaan mereka di dalam proses pemilu. Berbeda halnya dengan etnis Tionghoa di kota Surabaya yang cenderung apatis pada saat pemilu, di Situbondo justru yang terjadi sebaliknya. Yakni, pada saat pemilu, banyak dari etnis Tionghoa yang ikut memilih dan berpartisipasi pada saat hari pemilihan. Itu terlihat dari banyaknya TPS-TPS (tempat pemungutan suara) yang didatangi oleh etnis Tionghoa.

Memang benar, masih saja ada yang tak peduli dengan proses pemilu. Namun, ketidakpedulian mereka dikalahkan oleh nilai-nilai kultural. Mereka merasa sungkan jika tidak datang ke TPS. Termasuk juga merasa takut karena stereotipe dan stigmatisasi etnis di dalam masyarakat Situbondo masih begitu kentara. Sehingga, jika etnis Tionghoa tidak datang ke TPS, maka akan dianggap kelompok yang eksklusif dan tak menghargai proses demokrasi di Indonesia. Karena itulah, dalam ajang pemilu, baik pilpres, pilbup, pilgub, ataupun pilkades, etnis Tionghoa di Situbondo itu selalu menyempatkan dirinya hadir dan rela meninggalkan rutinitas bisnisnya untuk sementara waktu.

Memilih Partai Politik, Merindukan Tokoh Nasionalis dan Pluralis (Kasus di Malang)

Kota Malang dengan kultur abangan secara politis dikenal sebagai basis dari partai-partai nasionalis. Berdasarkan data hasil pemilu legislatif tahun 2004, dukungan terhadap partai berazaskan nasionalis mencapai lebih dari separuh kursi dewan. Hal ini dapat dihitung melalui perolehan suara tiga partai nasionalis: PDI-P, Golkar dan Demokrat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai pemenang pemilu memperoleh suara sebesar 25,95% atau 12 kursi dewan, Partai Golkar berhasil memperoleh dukungan sebesar 12,40% atau 5 kursi dewan. Sedangkan Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 14,54% atau setara dengan 7 kursi dewan. Total perolehan tiga partai nasionalis ini sebesar 52,89% atau sebanyak 24 kursi dewan.

Meski sebagian kultur masyarakat adalah abangan, sebagian masyarakat Malang juga masuk dalam kategori santri, yang termanifestasi dalam ormas Islam NU dan Muhammadiyah. Hal ini juga sesuai dengan hasil pemilu 2004, dimana PKB sebagai saluran politik warga NU dan PAN sebagai saluran politik warga Muhammadiyah memperoleh hasil yang cukup besar. PKB yang dipimpin oleh Gus Dur mampu memperoleh suara 17,54% atau sebanyak 8 kursi dewan, sedangkan PAN mendapatkan dukungan sebesar 6,67% atau 5 kursi dewan.

Data hasil pemilu legislatif tersebut menunjukkan bahwa partisipasi dan afiliasi politik warga Kota Malang cenderung identik dengan dimensi sosio-kultural masyarakatnya. Meski perkembangan kota semakin pesat diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak banyak memberikan pengaruh terhadap perubahan sikap politik sebagian besar masyarakatnya.

Kecenderungan masih adanya politik aliran masih cukup kuat di Kota Malang. Hal ini ditunjukkan dengan pertimbangan pilihan yang masih melihat pengelompokan-pengelompokan sosial (ormas) serta figur dan ketokohan.

Jika kecenderungan partisipasi politik kelompok mayoritas seperti ini, lantas bagaimana kecenderungan partisipasi kelompok minoritas? Berdasarkan uraian sebelumnya, kecenderungan partisipasi politik etnis Tionghoa di Kota Surabaya, Tuban dan Situbondo bersifat pragmatis dan oportunistis. Hal ini dikarenakan latar belakang mereka yang bergerak dan menggeluti dunia bisnis. Akibatnya, kehidupan politik pun mereka ukur melalui prinsip kalkulasi, rasionalitas bisnis ataupun untung-rugi. Untuk pilihan parpol, kebanyakan etnis Tionghoa itu cenderung memilih parpol besar yang berideologi nasionalis.

Kesibukan dan pilihan kelompok Tionghoa untuk menggeluti dunia perdagangan memang membawa konsekuensi bagi sebagian besar warga Tionghoa untuk tidak masuk dalam dunia politik. Namun hal ini bukan satu-satunya faktor mengapa warga Tionghoa cenderung pragmatis dan tidak antusias dengan permasalahan politik. Sebagian dari mereka merasa trauma dengan kerusuhan bernuansa etnis pada tahun 1998, yang merupakan dampak langsung dari suksesi politik rezim Soeharto.

Pendapat berbeda menyatakan bahwa partisipasi etnis tionghoa pada pemilu 1999 dan 2004 dapat dikatakan cukup tinggi. Sebagian besar menggunakan hak suaranya, hampir 90% lebih persentasenya. Pada tahun 1999 partisipasi politiknya masih sekadar menjadi simpatisan partai tertentu namun tidak sampai terlibat terlalu jauh menjadi pengurus partai atau bahkan terjun

menjadi caleg. Bahkan pada tahun 2004 ada yang mencalonkan diri dari PDIP yakni seorang pengusaha sukses, Handoko, namun gagal dan sekarang sudah tidak terlibat lagi dalam politik. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa benar ada trauma sejarah yang menghinggapi pemikiran warga Tionghoa, dan memang faktor inilah yang memunculkan sikap pragmatisme.

Masih adanya trauma masa lalu di sebagian besar warga etnis Tionghoa, berpengaruh juga terhadap isu-isu sosial politik yang dianggap penting. Sebagian besar warga Tionghoa masih menganggap bahwa isu tentang Hak Azasi Manusia adalah yang utama. Kondisi ini dapat dipahami, mengingat etnis Tionghoa yang minoritas dari sisi jumlah/kuantitas seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan ketika berhadapan dengan mayoritas. Terlebih jika didalamnya dikembangkan isu tentang dominasi perekonomian, perbedaan budaya dan agama, maka kelompok etnis Tionghoa memang sangat rentan menjadi korban dari kepentingan sosial dan politik mayoritas. Dalam catatan sejarah bangsa ini, konflik politik yang menjadikan etnis Tionghoa sebagai korban sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka, Ricklefs (1991) mencatat bahwa pada tanggal 9 Oktober 1740 terjadi pembantaian VOC terhadap 10.000 orang Tionghoa karena dianggap memberontak. Dalam catatan Setiono (2002), pada waktu Perang Jawa, 23 September 1825 pembantaian terjadi di Ngawi. Sementara itu, pada masa kemerdekaan terjadi pembunuhan terhadap 635 jiwa di Tangerang. Karena dianggap terlibat dalam peristiwa G 30 S tahun 1965, orang-orang Tionghoa juga menjadi korban kekerasan. Pada pemerintahan Suharto awal hingga tahun 1980-an, orang-orang Tionghoa menjadi korban kekerasan, seperti pada peristiwa Malari (1974) dan kasus Solo (1980). Sementara itu, antara tahun 1996-2000 tercatat lebih dari 55 kasus kekerasan anti-

Cina, beberapa di antaranya mengakibatkan korban jiwa, seperti Situbondo (10/10/1996) (Iriani, et.al, 1998; bandingkan dengan Anam, 1996; Santoso, 2002).

Sedangkan isu-isu lainnya yang menjadi perhatian etnis Tionghoa adalah tentang perekonomian. Hal ini tentu saja terkait dengan kepentingan bisnis dan usaha, yang sebagian besar merupakan sumber penghidupan etnis Tionghoa. Isu ini cenderung mendorong sebagian etnis Tionghoa untuk ikut terlibat langsung dalam proses politik, misalnya terjun sebagai caleg, mendukung calon walikota/bupati serta caleg dalam pemilu.

Isu sosial dan politik lainnya yang menjadi perhatian etnis Tionghoa adalah tentang semangat pluralisme dan pengakuan/ perlindungan terhadap minoritas. Permasalahan ini menjadi hal penting bagi etnis Tionghoa karena dari sisi sosial, budaya dan jumlah populasi di Kota Malang, mereka tergolong sedikit/ terbatas. Disamping itu, pengalaman konflik bernuansa etnisitas yang terjadi di masa lalu juga menjadi faktor pendorong untuk menjunjung tinggi pluralisme nilai dan kemajemukan budaya. Selain ketiga isu tersebut, sebagian kecil warga Tionghoa juga mendasarkan pilihannya pada isu-isu yang bersifat sektarian yakni agama dan budaya. Pilihan politik terhadap partai dan calon lebih didorong oleh kedekatan agama, sosial dan emosional, misalnya berbasis agama yang sama, calon dari etnis yang sama dan sebagainya.

Kecenderungan terhadap isu-isu sosial politik tersebut pada akhirnya mempengaruhi pilihan politik etnis Tionghoa pada pemilu tahun 1999 dan 2004. Pertama, sikap pragmatis dan oportunis yang ditunjukkan oleh sebagian etnis Tionghoa mendorong mereka untuk memilih partai/calon yang memiliki

peluang terbesar untuk menang. Hal ini didorong dengan pertimbangan bahwa dengan mendukung partai/calon yang berpeluang besar untuk menang, maka mereka berharap akan mendapatkan perlindungan hukum (HAM) bagi etnis mereka serta jaminan kelangsungan bisnis.

Kedua, model pilihan politik berdasarkan isu adalah dengan memilih partai/calon yang berkomitmen terhadap semangat pluralisme dan menghargai perbedaan. Bagi kelompok ini mendukung partai/calon yang berpeluang menang saja tidak cukup, karena yang terpenting adalah komitmen dan perjuangannya terhadap kelompok-kelompok minoritas. Tidak ada jaminan bahwa calon/partai yang berpeluang besar untuk menang juga berkomitmen terhadap semangat pluralisme.

Ketiga, harapan adanya perlindungan (*social safety*) tidak bisa diamanatkan pada calon/partai diluar kelompoknya, sehingga yang paling aman adalah dengan mendukung partai/calon yang memiliki latarbelakang agama, sosial/budaya yang sama.

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber, sebagian besar pilihan politik etnis Tionghoa ditujukan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dari sisi ideologi dan sejarah, embrio PDI-P adalah gabungan partai-partai nasionalis dan agama (non-Islam), sehingga menjadi saluran politik yang paling logis bagi etnis Tionghoa. Hal ini diperkuat dengan munculnya caleg PDI-P yang berasal dari etnis Tionghoa pada pemilu 2004 di Kota Malang.

Disamping itu pada konteks Kota Malang, PDI-P pasca orde baru adalah partai pemenang pemilu. Hal ini bisa dilihat dari hasil pemilu legislatif tahun 2004 yang menempatkan PDI-P sebagai pemenang dengan perolehan suara 25,95%. Dengan konteks seperti ini, dari sisi kepentingan bisnis dan perlindungan-

an hukum etnis Tionghoa merasa aman jika mendukung partai yang berkuasa. Sikap ini juga bagian dari upaya membaaur dengan masyarakat sekitar, yang sebagian besar memilih PDI-P.

Setelah PDI-P alternatif pilihan politik etnis Tionghoa selanjutnya adalah Partai Damai Sejahtera (PDS). PDS menjadi pilihan khususnya bagi etnis Tionghoa yang beragama Katolik/Kristen, karena PDS berangkat dari penggiat keagamaan Kristen yang sebagian besar diisi oleh tokoh-tokoh agama.

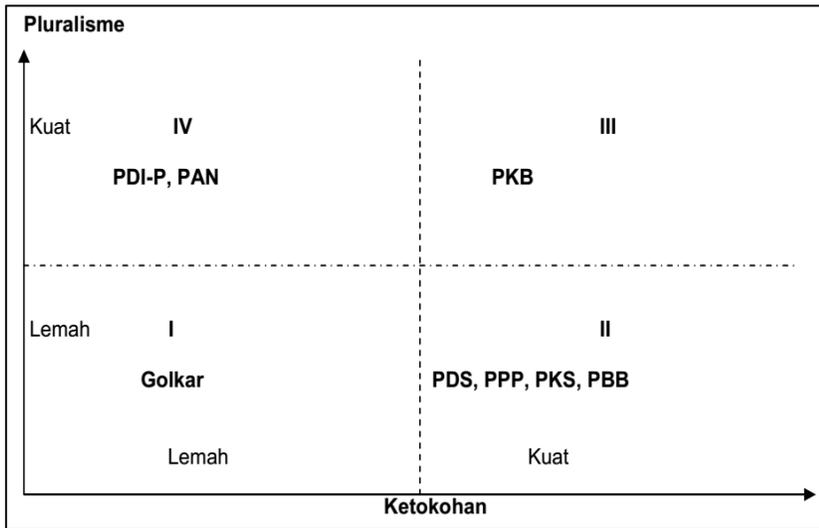
Alternatif berikutnya bagi etnis Tionghoa adalah memilih partai atau kandidat yang memperjuangkan nilai-nilai pluralisme dan perlindungan terhadap minoritas. Dalam hal ini partai yang dimaksud adalah Partai Kebangkitan Bangsa dengan tokohnya KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sosok Gus Dur yang sangat toleran dan menghargai perbedaan menjadi figur yang dikagumi oleh etnis Tionghoa. Sejak era pemerintahan Gus Dur, etnis Tionghoa diterima sebagai penduduk asli Indonesia dan menghapus diskriminasi.

Penghargaan tinggi diberikan kepada tokoh-tokoh bangsa oleh etnis Tionghoa yang kebijakannya konsern terhadap kelompok-kelompok minoritas. Seputar hak kewarganegaraan yang disandang oleh etnis Tionghoa, naiknya Habibie menghapus istilah pribumi dan non pribumi, sehingga Habibie juga mendapat tempat di hati warga Tionghoa. Sedangkan naiknya Gus Dur, etnis Tionghoa mendapatkan kebebasan menjalankan ibadah di kelenteng konghucu sebagai agama yang diakui pemerintah.

Kecintaan terhadap figur Gus Dur sebenarnya sudah terbangun sejak lama, yakni ketika masih menjadi ketua NU. Di setiap perayaan natal misalnya, Gus Dur memerintahkan pasukan

banser dari setiap lapisan dan wilayah untuk bersama-sama ikut mengamankan gereja.

Gambar 8
Kuadran Pilihan Partai Politik berdasarkan Isu Pluralisme dan Ketokohan



Dari data kualitatif yang ditemukan di lapangan, konstruksi masyarakat etnis Tionghoa berdasarkan isu pluralisme dan ketokohan terhadap partai politik yang dipilih dalam pemilu dapat dilihat pada gambar 8.. Berdasarkan gambar tersebut pada kuadran I, etnis Tionghoa mengkonstruksi bahwa Partai Golkar tidak memiliki ketokohan yang kuat dan isu pluralisme yang lemah. Hal ini didasarkan pada pengalaman sejarah di masa orde baru, dimana keberadaan etnis Tionghoa terpinggirkan dari sisi politik. Bahkan terdapat diskriminasi yang ditunjukkan melalui pengurusan dokumen kependudukan terhadap etnis Tionghoa. Disamping itu dari sisi budaya dan keagamaan, tidak

ada kebebasan bagi etnis Tionghoa untuk mengekspresikan kepercayaan dan tradisinya secara terbuka kepada masyarakat. Dari sisi ketokohan, Partai Golkar dianggap tidak memiliki figur kepemimpinan atau ketokohan yang kuat, terutama figur yang dapat mengayomi keberadaan etnis minoritas.

Kuadran II menunjukkan konstruksi etnis Tionghoa terhadap partai-partai yang dianggap memiliki kadar ketokohan tinggi namun lemah dari sisi komitmen terhadap pluralisme. Sebagian besar partai-partai yang masuk pada kuadran ini adalah partai dengan latar belakang agama, yaitu : PPP, PBB, PKS dan PDS. Kuadran III adalah konstruksi terhadap partai yang memiliki komitmen kuat terhadap semangat pluralisme dan juga didukung dengan kepemimpinan dan ketokohan yang juga dominan. Pada kuadran ini etnis Tionghoa cenderung menempatkan PKB dengan tokohnya Abdurahman Wahid. Kuadran IV menunjukkan konstruksi masyarakat etnis Tionghoa terhadap partai politik yang memiliki komitmen kuat terhadap isu dan semangat pluralisme, tetapi dianggap tidak memiliki tokoh yang kuat dan berkarakter. Pada kuadran ini, penilaian etnis Tionghoa tertuju pada PDI Perjuangan dan PAN.

Temuan lain tentang sikap politik etnis Tionghoa dikategorikan dalam tiga kelompok. Kelompok pertama, tingkat bawah. Pada tingkat ini biasanya terdiri dari golongan Tionghoa yang militan, mereka yang menjadi kader partai (mis. PDS). Mereka aktif dalam kegiatan partai dan hadir dalam pencoblosan. Kelompok kedua, tingkat menengah. Pada tingkat ini terdiri dari golongan tionghoa yang umumnya golput dan tidak peduli pada politik. Biasanya adalah kelompok pekerja dan karyawan swasta. Bagi segmen ini, permasalahan politik bukan yang utama karena

tidak berimbas langsung terhadap nasib dan kepentingan mereka.

Kelompok terakhir, yaitu di tingkat elit. Pada tingkat ini sikap mereka cenderung pragmatis dan mempunyai kepentingan sendiri dalam memberikan dukungan pada salah satu calon. Dan dukungan dari kelompok elit ini menyebar ke parpol-parpol besar yang ada, dan mereka akan mendukung parpol mana yang menang pemilu. Dukungan terhadap partai pemenang pemilu mereka lakukan dikarenakan ada kepentingan-kepentingan ekonomi guna mengamankan bisnis-bisnis yang mereka jalankan. Jika dikaji dari sisi agama terhadap kecenderungannya dalam politik, seperti yang disampaikan Bratayana Ongkowijoyo etnis Tionghoa yang beragama Konghucu cenderung memilih PDI Perjuangan, sedangkan yang beragama Kristen/Katolik cenderung memilih PDS dan hanya sebagian kecil yang memilih partai-partai lain seperti PKB dan PAN. Berdasarkan data tersebut, dapat dipetakan kecenderungan pilihan politik masyarakat Tionghoa berdasarkan agama dan status ekonomi sosial.

Berpartisipasi mengikuti Masa Lalu (Kota Madiun)

Masyarakat Kota Madiun dalam konteks sosio-politik, kecenderungan paham dan ideologi politik nasionalis/abangan. Hal ini sangat dipengaruhi dengan kecenderungan subkultur mataraman (lihat Sadewo dan Maliki, 2001). Berdasarkan hasil perolehan suara partai dalam pemilu legislatif tahun 2004 juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Partai yang menjadi pemenang pemilu adalah PDI Perjuangan, yang kemudian disusul oleh Golkar pada posisi kedua. Di sisi yang lain,

keberadaan dan pengaruh partai berbasis agama masih ada namun tidak memperoleh dukungan signifikan.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa di Madiun masih berlaku asumsi politik aliran, dimana pilihan dan partisipasi politik warga didorong oleh fragmentasi ideologi politik aliran yang ada di Indonesia. Kecenderungan ini juga mengikis partisipasi politik berdasarkan pertimbangan ketokohan dan figuritas. Pertimbangan latar belakang sosial dan ideologi muncul lebih kuat jika dibandingkan dengan alasan-alasan yang lain. Tingkat perubahan afiliasi politik warga Madiun juga rendah dan cenderung statis. Misalnya yang berpaham nasionalis pasti arahnya tertuju pada PDI-P atau Golkar, NU cenderung ke PKB, Muhammadiyah ke PAN, Nasrani ke PDS dsb.

Jika kondisi sosio-politik masyarakat Madiun seperti ini, bagaimana kecenderungan partisipasi politik di kalangan minoritas, khususnya etnis Tionghoa. Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber kunci, partisipasi politik etnis Tionghoa memiliki kecenderungan yang hampir sama dengan di Kota Malang. Terutama terkait dengan pragmatisme politik dan isu-isu kepentingan bisnis. Pertimbangan isu ini mendorong kelompok etnis Tionghoa memberikan dukungan dan pilihan politiknya kepada partai berkuasa atau partai yang memiliki peluang menang terbesar. Hal ini juga yang menjadi penjelas mengapa pilihan politik etnis Tionghoa cenderung berubah dan tidak fanatik pada satu kekuatan politik tertentu.

Sebagian kecil dari etnis Tionghoa memilih berdasarkan isu Hak Azasi Manusia dan pluralisme. Hal ini berbeda dengan kecenderungan di Kota Malang, isu HAM dan pluralisme menjadi salah satu pertimbangan utama. Di Madiun, isu dan wacana

HAM dan pluralisme hanya berpengaruh terhadap sebagian kecil etnis Tionghoa saja. Mayoritas cenderung pragmatis demi kepentingan bisnis atau tidak mau terlibat dalam permasalahan politik sama sekali.

Berdasarkan keterangan narasumber, hal ini didorong oleh kondisi sosial dan budaya serta sejarah di masa lalu. Etnis Tionghoa di Madiun juga terpengaruh dengan cara pandang dan tingkah laku kultur mataraman. Kecenderungan perilaku dan partisipasi politiknya tidak lugas dan introvert. Ketidaklugasan ini dapat dimaknai sebagai mekanisme survival kelompok minoritas, agar bisa berseiringan dengan kecenderungan perilaku mayoritas.

Jika ditinjau dari sejarah di masa lalu, etnis Tionghoa di Madiun relatif tidak memiliki pengalaman konflik seperti yang terjadi beberapa daerah lainnya. Bahkan pada Mei 1998, kerusuhan politik yang membawa isu etnis di Jakarta ternyata tidak berimbas sama sekali di Madiun. Situasi sosial dan politik di Madiun pada saat itu sangat kondusif dan terkendali. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa perilaku dan partisipasi politik etnis Tionghoa di Madiun relatif mengikuti kecenderungan umum partisipasi etnis Tionghoa mayoritas. Tidak ditemukan varian khusus yang berbeda dengan temuan di kota-kota yang lain.

BAB V

PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA:

KOMPARASI LIMA KOTA BESAR

Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik pada lima kota memberikan gambaran mengenai ruang-ruang interaksi dan eksistensi etnis Tionghoa yang ada di Jawa Timur. Arena yang berbeda ini memunculkan bentuk dan kecenderungan partisipasi yang berbeda antar wilayah. Berikut diuraikan beberapa aspek penting yang mempengaruhi pola partisipasi politik etnis Tionghoa.

Mempertahankan Eksistensi Ekonomi

Ada sebuah pernyataan yang patut kita refleksikan dalam konteks penelitian ini. Menurut Denys Lombard, seorang sejarawan terkenal dari Prancis, pernah mengatakan bahwa tanpa kehadiran etnis Tionghoa, maka kemungkinan bangsa kita tidak akan dapat mengenal uang sebagai alat pertukaran ekonomis. Bahkan, lanjut Lombard, kemajuan teknologi agraris dan bisnis di masyarakat kita juga disebabkan oleh penetrasi etnis Cina ketika mulai berada di Hindia-Belanda (Denys Lombard, 2000). Mengapa etnis Tionghoa memiliki

kompetensi dan kualitas mumpuni dalam bidang ekonomi ? Jawabnya, tak lepas dari aspek historis dan keberadaan mereka yang minoritas di negeri ini.

Ketika masa kolonialisme Belanda, Cina mendapatkan privilege dari pemerintah kolonial untuk mengurus bidang ekonomi masyarakat. Lisensi berupa perdagangan gula, candu, arak, pertokoan, dan juga tempat perjudian diberikan pemerintah kolonial secara mudah. Tujuannya agar mereka nantinya memberikan kontribusi yang besar terhadap kas kolonial (MC. Ricfleks, 2005). Memang benar, pada beberapa tahun, pemasukan terhdap kas pemerintah kolonial meningkat drastis. Namun, perilaku koruptif dan gaya hedonis para petinggi kolonial Belanda membuat kas tersebut menjadi menyusut.

Kondisi krisis akibat adanya praktek korupsi dan bergaya hidup mewah dari para petinggi Belanda di Jawa itu yang membuat pihak kompeni Belanda berupaya monopoli perdagangan Cina. Cina merupakan kompetitor ekonomi potensial Kompeni Belanda yang harus dilenyapkan, karena dikhawatirkan pihak Belanda kalah bersaing dalam lini perdagangan (Denys Lombard, 2000; bandingkan Dorleon 2006). Apalagi terkadang Cina terlalu mendominasi perdangan sehingga mereka merasa bangga jika bisa meraup untung besar. Melihat mentalitas dan etos kerja Cina, maka kompeni Belanda akhirnya berupaya untuk memberangus keberadaan Cina di Batavia dan meluas ke daerah Jawa lainnya. Lalu meletuslah aksi pembantaian masyarakat Cina oleh Belanda pada tahun 1740. Menurut Belanda aksi itu disebut dengan “pemberantasan pemberontak Cina”. Akibat meletusnya pembantaian berdarah 1740 itu, kurang lebih 10.000 Cina tewas terbunuh oleh senapan Belanda dan sekitar 700 rumah dibakar hangus.

Pasca kerusuhan itu kemudian etnis Tionghoa (Cina) bertekad untuk membangun kembali kejayaan ekonominya dengan memulai menata jaringan bisnisnya. Apalagi, etnis Tionghoa tergolong etnis minoritas di Indonesia. Jadi, salah satu jalan agar bisa bertahan hidup, mereka harus memiliki kekuatan dalam bidang ekonomi. Karena, aspek ekonomi itulah yang setidaknya memberikan peluang yang luas bagi etnis Tionghoa. Di luar aspek ekonomi, etnis Tionghoa kurang memiliki peluang untuk menjadi orang besar. Fenomena inilah yang dapat kita lihat hingga masa kekinian. Betapa tidak, berdasarkan temuan data di lapangan menunjukkan bahwa di lima kota (Surabaya, Tuban, Situbondo, Kota Malang dan Kota Madiun), golongan minoritas Tionghoa mampu mendominasi bidang perdagangan di masing-masing daerah tempat mereka tinggal. Di tiga kota seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun, golongan Tionghoa tak memiliki kompetitor yang berarti dalam urusan bisnis. Namun, di Situbondo, mereka mau tak mau harus berkompetisi dengan etnis Madura yang merupakan salah satu pihak yang mendominasi perdagangan di sana.

Keberadaan etnis Tionghoa di lima daerah yang diteliti secara ekonomi memiliki posisi yang sangat kuat. Hampir sebagian besar mendominasi sumber-sumber ekonomi yang ada di daerah. Di Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Madiun lebih banyak bergerak di perdagangan barang dan jasa. Sedangkan di Situbondo dan Tuban ada beberapa yang mendominasi sektor-sektor pertanian dan perikanan. Kondisi tersebut menempatkan etnis Tionghoa dalam lapisan atas piramida sosial di wilayahnya masing-masing.

Sebagai kelompok masyarakat yang dominan namun dengan jumlah terbatas, etnis Tionghoa menjelma sebagai elit-elit ekonomi yang berpengaruh. Sebagian mereka memiliki per-

usaha yang banyak memperkerjakan masyarakat lokal. Tidak sedikit di antara mereka membangun pola patron-klien dengan jaringan masyarakat di bawahnya. Kondisi ini pada tataran tertentu berpotensi memunculkan permasalahan sosial jika tidak terjadi diversifikasi aktor dan perluasan lapangan ekonomi. Pada daerah perkotaan seperti di Surabaya dan Malang hal ini dapat diminimalisir karena sumber ekonomi tidak hanya dikuasai oleh satu aktor (etnis Tionghoa) melainkan tersebar pada beberapa kelompok-kelompok sosial.

Sedikit berbeda dengan di Surabaya dan Malang, dominasi ekonomi etnis Tionghoa di Tuban dan Madiun berkembang melalui sejarah panjang perdagangan dan interaksi sosial dengan masyarakat lokal. Meski pengaruh etnis Tionghoa sangat kuat potensi konflik sosial karena persoalan ekonomi relatif tidak besar. Muncul pemahaman bahwa memang keahlian etnis Tionghoa adalah di bidang ekonomi, sehingga kesenjangan dan kecemburuan bisa dihindari.

Temuan yang berbeda diperoleh di Situbondo. Daerah yang memiliki sejarah konflik etnis ini, memiliki potensi konflik yang relatif besar jika dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Di Situbondo sektor ekonomi didominasi oleh dua kelompok besar yang cenderung berkompetisi yaitu etnis Tionghoa dan Madura. Kompetisi yang cenderung manifest ini sangat rentan terjadi konflik terbuka.

Strategi Adaptif: Agar tetap Selamat di Lingkungan Politik yang Berubah

Posisi etnis Tionghoa sebagai kelompok dominan di sektor ekonomi tidak lantas mendukung posisi di sektor yang lain.

Sebagian besar etnis Tionghoa mengalami keterbatasan dalam kiprah sosial maupun politik. Sebagaimana ciri yang melekat pada kelompok minoritas, etnis Tionghoa di lima kota yang diteliti juga menunjukkan gambaran yang sama. Berbagai stigma yang melekat seperti sebutan “pendatang”, “non-pribumi” secara tidak langsung melokalisir posisi etnis Tionghoa hanya pada sektor ekonomi.

Kondisi demikian memaksa kalangan etnis Tionghoa untuk membangun strategi adaptif dengan cara menjadi warganegara yang patuh dan taat kepada negara. Temuan di lima daerah menunjukkan kecenderungan yang sama, bahwa etnis Tionghoa memiliki hubungan yang baik dengan negara. Bentuk-bentuk ketaatan adalah dengan menjalankan semua ketentuan perundangan (PP, Perda dsb), mendukung/mensukseskan kegiatan-kegiatan pemerintahan dengan menjadi sponsor atau penyandang dana dan lain-lain. Meski pada beberapa daerah ditemukan bentuk-bentuk partisipasi yang terkesan “terpaksa”, namun mengambil posisi “membantu” negara adalah pilihan yang logis bagi etnis Tionghoa.

Beberapa indikasi yang memperkuat hal tersebut adalah, bahwa sebagian besar etnis Tionghoa jika terlibat dalam permasalahan publik (terutama ketika berhubungan dengan masyarakat lokal/mayoritas), maka model penyelesaian dilakukan secara struktural, yaitu menyerahkan sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku. Fenomena ini terjadi di seluruh daerah, kecuali di Malang dan Situbondo. Warga etnis Tionghoa di Malang dan Situbondo justru mengupayakan penyelesaian-penyelesaian secara kultural. Salah satu bentuknya adalah dengan membangun komunikasi dengan tokoh/elit agama dan ormas yang dominan di lingkungannya.

Seperti yang terjadi di Malang, etnis Tionghoa justru lebih percaya kepada institusi sosial di luar negara, daripada dengan institusi formal seperti aparat kepolisian dan pemerintah. Problem-problem yang terkait dengan eksistensi sosial dan budaya justru lebih mudah di-*sharing* dengan kelompok-kelompok dan tokoh di luar negara. Dalam konteks Malang adalah dengan “meminta perlindungan” kepada Kyai dan Pondok Pesantren terutama dari kalangan NU. Hal ini terjadi di Malang pada tahun 1998, dimana sebagian besar kelompok minoritas justru datang kepada para ulama untuk meminta perlindungan. Sejak saat itu terbangun hubungan yang harmonis antara NU dengan kelompok-kelompok minoritas, baik minoritas agama maupun etnis. Sampai dengan sekarang, di setiap perayaan Natal para santri pondok pesantren serta banser dari NU selalu terlibat dalam pengamanan gereja dan lokasi-lokasi strategis di Malang. Hal ini mengindikasikan bahwa institusi negara justru terbatas sekali perannya dalam membangun integrasi sosial di Malang. Integrasi sosial justru terbangun melalui interaksi-interaksi langsung tanpa intervensi kekuasaan.

Strategi berikutnya adalah berupaya untuk ikut terlibat dan mendukung berbagai kegiatan sosial. Di beberapa daerah, seperti di Madiun, mekanisme agar dapat diterima oleh kelompok mayoritas adalah dengan memperbanyak aktifitas santunan kepada kelompok-kelompok masyarakat di luar etnisnya. Etnis Tionghoa di Madiun melakukan berbagai aktifitas sosial untuk membangun simpati kelompok mayoritas dengan cara misalnya pada saat perayaan TRI Darma selalu melaksanakan kegiatan bakti sosial dan kegiatan yang bersifat umum untuk seluruh masyarakat.

Bentuk-bentuk strategi adaptif lainnya adalah dengan menjadi penggiat di forum-forum komunikasi dan silaturahmi antar etnis dan agama. Di Surabaya dan Tuban, hubungan lintas agama berjalan dengan cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari adanya forum keagamaan yang anggotanya terdiri dari berbagai macam latar belakang umat. Ada umat Kristen, Katolik, Islam, Konghucu, dan Budha. Di kota Surabaya, forum lintas agama itu bernama FKUB (Forum Kebebasan Umat Beragama). Sementara di Tuban, forum lintas agama itu bernama FK3 (Forum Komunikasi Kerukunan Kemanusiaan). Forum lintas keagamaan ini diprakarsai oleh masyarakat Islam yang bernaung dalam wadah NU. Dengan adanya forum lintas keagamaan ini, maka paling tidak telah terbangun tiga hal. Yakni, komunikasi antar umat (terpupuknya sikap toleransi sosial serta menghormati keberadaan agama lain), terbangunnya nilai-nilai inklusifitas beragama, dan juga sebagai katup penyelamat (saluran pemecah konflik berbasis agama).

Isu dan Nilai-nilai Yang Diperjuangkan di Arena Reformasi

Keberadaan dan keberlanjutan kelompok-kelompok sosial salah satunya diikat oleh adanya nilai-nilai dan cita-cita bersama. Faktor nilai dan kepentingan bersama bahkan dapat membangun solidaritas yang kuat di dalam kelompok. Terlebih bagi kelompok minoritas ditengah dominasi sosial budaya dari kelompok mayoritas. Kondisi yang sama ditemukan pada kelompok etnis Tionghoa di lima daerah yang diteliti. Berikut beberapa nilai dan isu yang menjadi perhatian etnis Tionghoa dan menjadi pertimbangan dalam berpartisipasi politik:

Pertama, nilai tentang keberlangsungan usaha/ kepentingan bisnis. Isu dan permasalahan ini terkait dengan latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat Tionghoa. Oleh karena sebagian besar etnis Tionghoa berkiprah pada dunia usaha dan perdagangan, maka keterlibatan dalam proses politik diarahkan untuk mengamankan kepentingan bisnis yang dikelolanya. Pertimbangan ini murni kalkulasi bisnis, dimana kecenderungan pilihan politiknya akan ditujukan kepada kandidat/partai berkuasa atau kandidat/partai yang memiliki peluang terbesar untuk menang.

Kedua, nilai-nilai tentang perlindungan Hak Azasi Manusia. Sebagian etnis Tionghoa yang konsern terhadap isu ini mendasarkan pada pengalaman sejarah konflik bernuansa etnis pada tahun 1998. Konflik politik yang akhirnya merembet pada permasalahan etnisitas tersebut membawa trauma mendalam pada sebagian etnis Tionghoa. Hal ini menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan pilihan politik. Terutama kepada kandidat/partai yang paling berkomitmen terhadap isu tersebut.

Ketiga, nilai-nilai tentang pluralisme dan pengakuan terhadap kelompok minoritas. Isu dan permasalahan ini juga menjadi salah satu pertimbangan etnis Tionghoa menentukan pilihan politiknya. Pengalaman yang sangat panjang hidup dalam rezim otoritarian dan kebijakan yang diskriminatif, menjadi dasar sebagian etnis Tionghoa untuk mendukung kekuatan politik yang pro dengan semangat pluralisme. Dengan semakin berkembangnya semangat pluralisme, tentu akan mampu membangun rasa aman di kalangan minoritas. Akibatnya, kandidat/partai dengan latar belakang apapun akan memperoleh dukungan dan simpati dari etnis Tionghoa jika benar-benar berkomitmen terhadap semangat pluralisme.

Keempat, isu agama dan budaya. Pertimbangan persamaan agama dan kedekatan budaya juga menjadi faktor penentu pilihan politik. Pada segmen ini, berbagai argumentasi tentang isu HAM dan pluralisme tidak serta merta meyakinkan mereka untuk memilih kandidat/partai. Bagi mereka, yang paling dapat memberikan jaminan perlindungan hanyalah kelompok yang memang memiliki persamaan-persamaan agama dan budaya.

BAB VI

PENUTUP: PARTISIPASI POLITIK DI TENGAH- TENGAH KEBERAGAMAN BUDAYA JAWA TIMUR

Partisipasi politik etnis Tionghoa pada transisi demokrasi di Jawa Timur dapat dipetakan dalam dua bentuk. Pertama adalah langsung dan formal, yakni ikut terlibat langsung menjadi caleg, secara formal terdaftar sebagai anggota pada kepengurusan partai politik dan maju menjadi calon dalam pemilihan kepala daerah. Kedua, bentuk partisipasi informal dan tidak langsung, yaitu aktifitas politik yang dilakukan di balik layar dengan memberikan dukungan berupa finansial dan fasilitas khusus kepada parpol maupun kandidat yang maju dalam kontestasi politik.

Perbedaan selanjutnya adalah tentang afiliasi terhadap partai politik. Ditemukan dua varian, yaitu memilih partai berdasarkan aliran (nasionalis dan agama) dan memilih partai berbasis

kepentingan. Pilihan partai berdasarkan aliran, adalah kecenderungan etnis Tionghoa memilih partai yang berideologi nasionalis atau agama tertentu. Dalam kasus ini sebagian besar mengidentifikasi pilihannya pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Sementara itu, pilihan partai berbasis kepentingan adalah kecenderungan memilih partai berdasarkan pertimbangan rasional dan melampaui sekat primordialisme. Kasus ini banyak terjadi di Malang, dimana ditemukan adanya pilihan terhadap partai-partai tertentu yang mengusung semangat pluralisme.

Temuan data yang lain berdasarkan status sosial ekonomi dan pertimbangan isu Kelompok dengan status sosial dan ekonomi tinggi serta konsern terhadap isu HAM, cenderung memilih PDI-P. Sedangkan kelompok dengan status ekonomi rendah, cenderung menggunakan pertimbangan agama dan kedekatan emosional sehingga memilih PDS. Sehingga bisa ditarik kesimpulan semakin tinggi status sosial etnis Tionghoa dan semakin tergerak karena isu HAM cenderung memilih partai berideologi nasional dan berbasis massa. Sebaliknya semakin rendah status sosial dan ekonomi semakin menguat primordialisme dalam menentukan pilihan partai, sehingga cenderung memilih partai berbasis agama.

Dari beberapa analisis dan penjelasan yang dilakukannya, untuk memetakan kecenderungan partisipasi politik etnis Tionghoa di Jawa Timur, dapat dikategorikan juga berdasarkan pengelompokan sosial budaya berdasarkan wilayah kultural. Berikut pola partisipasi politik Etnis Tionghoa di Jawa Timur.

Tabel 2
Ekonomi, Strategi survival, Hub. Lintas Agama, & Partisipasi Politik

No.	ASPEK	KOTA/KABUPATEN				
		KOTA SURABAYA	KOTA MALANG	KOTA MADIUN	KAB. TUBAN	KAB. SITUBONDO
1	KONDISI OBYEKTIF					
	PENDUDUK LOKAL MAYORITAS	JAWA SUROBOYOAN	JAWA MALANGAN	JAWA MATARAMAN	JAWA PESIRAN	PEDALUNGAN
	BUDAYA AGAMA YANG DOMINAN	MERATA	MERATA	ISLAM SANTRI TRADISIONAL DAN ABANGAN	ISLAM SANTRI TRADISIONAL DAN ABANGAN	ISLAM SANTRI TRADISIONAL
	ETNIS YANG BERADA DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN	JAWA MATARAMAN	JAWA MATARAMAN	JAWA MATARAMAN	JAWA MATARAMAN	JAWA MATARAMAN DAN PEDALUNGAN
	BASIS EKONOMI ETNIK LOKAL	INDUSTRI DAN JASA	INDUSTRI DAN JASA	INDUSTRI, PERTANIAN DAN JASA	NELAYAN, PERDAGANGAN DAN PERTANIAN	PERTANIAN DAN PERDAGANGAN
	PENGUSAHAAN PASAR	DOMINAN	DOMINAN	MULAI DOMINAN	DOMINAN	DOMINAN
	HUBUNGAN DENGAN PEKERJA	CUKUP BAIK	CUKUP BAIK	BAIK	CUKUP BAIK	CUKUP BAIK
	HUBUNGAN DENGAN EKSEKUTIF	CUKUP BAIK	BAIK	BAIK	CUKUP BAIK	CUKUP BAIK
	POTENSI KEKERASAN KARENA KOMPETISI EKONOMI	RENDAH (LATEN)	RENDAH (LATEN)	SANGAT RENDAH	RENDAH (LATEN)	CENDERUNG TINGGI (MANIFEST)

No.	ASPEK	KOTA/KABUPATEN				
		KOTA SURABAYA	KOTA MALANG	KOTA MADIUN	KAB. TUBAN	KAB. SITUBONDO
2	STRATEGI SURVIVAL	STRUKTURAL (HUKUM DAN BIROKRASI)	STRUKTURAL DENGAN PENDEKATAN ORMAS ISLAM DAN MENCIPTAKAN SIMBOL KEAGAMAAN	STRUKTURAL (HUKUM DAN BIROKRASI)	STRUKTURAL (HUKUM DAN BIROKRASI)	SOSIAL-KULTURAL DGN ORMAS ISLAM DAN SIMBOL AGAMA MAYORITAS
3	RUANG PUBLIK LINTAS AGAMA	FORUM (EKS FKUB)	FORUM (EKS FKUB)	FORUM (EKS FKUB)	FORUM (EKS FK3)	TIDAK ADA
	KOMUNIKASI	BAIK	KURANG	BAIK	BAIK	KURANG
	TOLERANSI	RELATIF BAIK	RELATIF BAIK KARENA DITERPA ISU KRISTENISASI DAN IZIN PENDIRIAN GEREJA)	BAIK	RELATIF BAIK	KURANG (PERISTIWA 10-10-1996)

	ASPEK	KOTA/KABUPATEN				
		KOTA SURABAYA	KOTA MALANG	KOTA MADIUN	KAB. TUBAN	KAB. SITUBONDO
4	PERILAKU POLITIK MASA ORBA	BUNGKAM	BUNGKAM	BUNGKAM	BUNGKAM	BUNGKAM
	PILIHAN PARTAI	GOLKAR	GOLKAR	GOLKAR	GOLKAR	GOLKAR
5	PERILAKU POLITIK PASKA ORBA	TERBUKA	TERBUKA	TERBUKA	TERBUKA	TERBUKA
	PILIHAN PARTAI	PARPOL NASIONALIS	PARPOL NASIONALIS	PARPOL NASIONALIS	PARPOL NASIONALIS	PARPOL NASIONALIS
		PARPOL BERBASIS AGAMA MINORITAS			PARPOL BERBASIS AGAMA MAYORITAS	PARPOL BERBASIS AGAMA MAYORITAS
	PARPOL ETNIS MINORITAS (PARTAI BHINNEKA TUNGGAL IKA)			TIDAK ADA	TIDAK ADA	
6	PARTISIPASI PARPOL	PENGURUS	PENGURUS	PENGURUS	PENGURUS	PENGURUS
		MENJADI CALEG	MENJADI CALEG	MENJADI CALEG	MENJADI CALEG DAN CAWABUP	MENJADI CALEG
7	SIKAP POLITIK	PRAGMATIS	PRAGMATIS		PRAGMATIS	PRAGMATIS

Kategori pertama, daerah pesisiran sub-etnis Jawa (Arek).

Wilayah ini berada di pesisir Utara Jawa Timur dan memiliki kultur yang identik yaitu sub-etnis Jawa (Arek). Dari aspek sosio-ekonomi, Hubungan sosial antara pekerja dan pemilik modal (etnis Tionghoa) terbangun dengan baik dan saling menguntungkan. Potensi konflik atau kekerasan karena kesenjangan ekonomi sangat rendah atau tidak ada. Dari aspek sosio-kultural, mekanisme survival etnis Tionghoa pada kategori ini menggantungkan pada jalur struktural (hukum dan birokrasi). Sementara itu, hubungan lintas agama terjalin sangat baik dan toleran. Hal ini ditunjang dengan adanya institusi FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama). Dari aspek sosio-politik, partisipasi etnis Tionghoa pada masa orde baru sangat terbatas karena tekanan dari penguasa. Sedangkan di era reformasi, partisipasi politik mulai meningkat namun cenderung pragmatis dan oportunistis. Afiliasi politik cenderung ke partai nasionalis.

Kategori kedua, daerah pesisiran sub-etnis Pendalungan.

Wilayah pesisiran dengan sub-etnis pendalungan. Pada kategori ini, eksistensi sosio-ekonomi etnis Tionghoa mendominasi sebagian besar sektor perekonomian. Akan tetapi dominasi ekonomi ini tidak diikuti dengan hubungan baik antara pekerja (etnis lokal) dan pemilik usaha (etnis Tionghoa). Sehingga rentan menghadapi konflik dengan penduduk lokal dikarenakan kesenjangan ekonomi.

Dari sisi sosio-kultural strategi survival masyarakat Tionghoa lebih banyak menggunakan jalur kultural melalui pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama dan memperkuat simbol-simbol kultural. Di sisi yang lain, hubungan antar umat beragama kurang terbangun dengan baik, minim komunikasi dan toleransi, dikarenakan tidak ada media/forum yang memadai.

Sedangkan dari sisi sosio-politik, minat terhadap permasalahan politik mulai muncul sejak memasuki era reformasi. Bahkan terlibat secara langsung dan terang-terangan hingga proses pencalegan. Situasi ini juga dapat menjadi pemicu konflik antara etnis Tionghoa dengan etnis lain. Sehingga pada kategori ini, kecenderungan munculnya konflik relatif tinggi.

Kategori ketiga, daerah pedalaman sub-etnis Jawa (Arek).

Karakteristik wilayah pedalaman dan kategori sub-etnis Jawa (Arek). Pada kategori ini, eksistensi sosio-ekonomi etnis Tionghoa mendominasi sektor perekonomian. Hubungan antara pekerja dan pemilik usaha terbangun dengan baik, sehingga friksi terkait dengan permasalahan kesenjangan ekonomi kemungkinannya kecil.

Dari aspek sosio-kultural, strategi survival etnis Tionghoa mengkombinasikan jalur struktural dan kultural. Tidak hanya melalui jalur hukum dan birokrasi, tetapi juga membangun kedekatan dengan beberapa tokoh agama dan ormas. Hubungan antar agama terjalin dengan baik, namun memiliki kecenderungan konflik yang bersifat laten. Hal ini dikarenakan secara kultural komposisi kultur abangan dan santri hampir berimbang. Terlebih dengan adanya isu yang berkembang tentang kristenisasi dan izin pembangunan tempat ibadah. Dari aspek sosio-politik, tingkat partisipasi politik etnis Tionghoa meningkat drastis ketika memasuki era reformasi. Tingkat keterlibatan politik juga sangat tinggi, hingga mencalonkan sebagai anggota legislatif. Pilihan politik variatif, mulai dari PDI-P, PDS hingga PKB. Pertimbangan dalam memilih dan isu politik yang dijadikan dasar adalah tentang kepentingan bisnis/usaha, isu HAM, pluralisme dan agama.

Kategori keempat, daerah pedalaman sub-etnis Jawa (Mataraman). Karakteristik pedalaman dengan sub-etnis Jawa (Mataraman). Dari segi ekonomi, sebagian besar sektor perekonomian dikuasai oleh etnis Tionghoa. Hubungan antar kerja cukup baik antara pekerja dan pemilik usaha. Namun karena kultur mataraman yang cenderung tertutup, maka dengan tingkat kesenjangan yang tinggi memiliki potensi konflik yang sifatnya laten. Pada aspek sosio-kultural hubungan antar umat beragama terjalin dengan baik. Hal ini dikarenakan isu tentang perbedaan agama bukan menjadi aspek yang mendasar pada kultur mataraman. Di samping itu, di Madiun juga terdapat FKUB yang memfasilitasi komunikasi antar agama. Dari sisi sosio-politik, etnis Tionghoa di Madiun tidak terlalu aktif terlibat dalam kegiatan politik. Tingkat partisipasi politik hanya dalam pemilu dan menjadi pelaku dibalik layar, sehingga cenderung pragmatis dan oportunistis.

Di dalam perkembangannya, sejumlah wilayah di Indonesia, beberapa orang etnis Tionghoa berhasil menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Di wilayah-wilayah yang etnis Tionghoa termasuk kelompok dominan, mereka menjadi kepala daerah tanpa harus menghilangkan identitas budayanya. Namun demikian, hal berbeda terjadi di dalam situasi masyarakat Tionghoa sebagai kelompok minoritas. Di Jawa Timur, Abah Anon, walikota Malang berasal dari etnis Tionghoa. Keberhasilan untuk memenangkan dalam pilkada karena menggunakan simbol-simbol mayoritas dalam politik identitasnya. Ia menyebutkan “abah” dan beragama Islam (agama mayoritas). Penggunaan simbol-simbol identitas kelompok mayoritas sangat menguntungkan posisi politik. Penggunaan simbol-simbol itu harus sangat hati-hati. Kegagalan penggunaan bisa berakibat fatal, seperti: kasus Ahok.

Daftar Pustaka

- Abdilah S., Ubed.
2002 **Politik Identitas. Pergulatan Tanda Tanpa Identitas.** Magelang: Indonesiatera.
- Anam,et.al., Choirul.
1996 Buku Putih dari Gerakan Pemuda Ansor. Peristiwa Situbondo, 10 Oktober 1996, dapat diakses di <http://www.fica.org/persecution/bp/B/Bab1.html>. tanggal 8 Agustus 2005.
- Anderson, Benedict.
1999 **Komunitas-komunitas Imajiner. Renungan tentang Asal-usul dan Penyebaran Nasionalisme.** Diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist.
- Apter, David E.,
1987 **Politik Modernisasi.** Diterjemahkan oleh Hermawan Sulistyio dan Wardah Hafidz. Jakarta: Gramedia.
1996 **Pengantar Analisa Politik.** Diterjemahkan oleh Setiawan Abadi. Jakarta: LP3ES.
- Artono, dan FX Sri Sadewo,
2006 Perkembangan Pola Pemukiman Etnik dan Jaringan Sosialnya di Surabaya tahun 1870 s/d sekarang. Studi tentang Pola Migrasi, Pemukiman dan Persebaran Kelompok Etnik sejak Kebijakan Liberalisasi Ekonomi Pemerintah Kolonial hingga Sekarang. **Laporan Penelitian Dosen Muda.** Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Banducci, Susan A., dan Jeffrey A. Knapp.
2006 The Impact of Minority Group Representation on Attitudes and Engagement. **Paper.** the Annual EPOP Conference, University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom.
- Barth, Frederik.
1988 Pendahuluan. dalam Frederik Barth. **Kelompok Etnik dan Batasannya.** Jakarta: UI-Press.

- Bass, Loretta E., dan Lynne M. Casper.
 1999 Are There Differences in Registration and Voting Behavior Between Naturalized and Native-born Americans? **Working Paper** No. 28. Washington: Population Division, Population Division
- Branton,
 2005 Minority Political Participation and Attitudes. **Presentasi**. Dapat diakses di <http://www.ruf.rice.edu/branton/10thclass.ppt>.
- Budiman, Arief.
 1998 “Cina atau Tionghoa?” **Jawa Pos**, 3 September.
- Djuweng,et.al., Stepanus.
 1996 **Kisah dari Kampung Halaman. Masyarakat Suku, Agama Resmi dan Pembangunan. Seri Dian IV**. Yogyakarta: Interfidei.
- Easton, David., dan Jack Dannis.
 1969 **Children in the Political Systems: Origins of Political Legitimacy**. New York: Macmillan.
- Gay, Claudine,
 2001 **The Effect of Minority Districts and Minority Representation on Political Participation in California**. California: Public Policy Institute of California
- Grim, Brian Jeffrey.
 2005 Religious Regulation’s Impact on Religious Persecution: The Effects of de Facto and de Jure Religious Regulation. **Dissertation**. PA: The Pennsylvania State University.
- Huntington, Samuel P., dan Joan Nelson.
 1994 **Partisipasi Politik di Negara Berkembang**. Diterjemahkan oleh Sahat Simamora. Jakarta: Rineka Cipta.
- Iriani,et.al., Damiana Petra.
 1998 **Melangkah dari Reruntuhan Tragedi Situbondo**. I Hariyanto (editor). Jakarta: Grasindo.

- Kong, Yuanzhi.,
 2000 Muslim Tionghoa Chengho. Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara. Dalam Hembing Wijayakusuma (editor), Jakarta: Pustaka Populer Obor.
- Kusnadi.
 2001 Negara, Kelompok Etnik, dan Konflik Sosial. **Kompas**. 4 Maret.
- Langenberg, Michael van.
 1990 The New Order State: Language, Ideology, Hegemony. Dalam Arief Budiman. **State and Civil Society in Indonesia**. Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies. Monash University.
- Lerner, Daniel.
 1983 **Memudarnya Masyarakat Tradisional**. Diterjemahkan oleh Muljarto Tjokrowinoto. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Maliki, Zainuddin.
 2000 **Birokrasi Militer dan Partai Politik dalam Negara Transisi**. Yogyakarta: Galang Press.
- Mustapadidjaja AR.
 2002 **Paradigma-paradigma Pembangunan dan Saling Hubungannya dengan Model, Strategi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan**. Jakarta: Lembaga Administrasi Nasional.
- Mas'ood, Mochtar., dan Colin MacAndrew.
 1991 **Perbandingan Sistem Politik**. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Muzakhi, Akhmat.
 2007 Peran Muslim Tionghoa. **Jawa Pos**, 14 Februari.
- Nasikun.
 1984 **Sistem Sosial Indonesia**. Jakarta: Rajawali.

Ong Hok Ham.

1998 "Perspektif Historis Rasialisme di Indonesia." **Jawa Pos**, 15 Juli.

Pelly, Usman.

1989 Hubungan antar Kelompok Etnis. Beberapa Kerangka Teoritis dalam Kasus Kota Medan. dalam Poeger. **Interaksi Antar Suku Bangsa dalam Masyarakat Majemuk**. Jakarta: PID Sejarah Nasional, Depdikbud.

1999 Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi. **Antropologi Indonesia**. No. 58/tahun XXIII.

2003 Murid Pri dan Nonpri pada Sekolah Pembauran: kebijakan Asimilasi Orde Baru di Bidang Pendidikan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Multikultural. **Antropologi Indonesia**. No. 71/tahun XXVII.

Pour, Julius.

1998 **Jakarta Semasa Lengser Keprabon. 100 Hari Menjelang Peralihan Kekuasaan**. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Rush, Michael., Philip Althoff.

1993 **Pengantar Sosiologi Politik**. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sadewo, FX Sri., dan Zainuddin Maliki.,

2001 Profil Kemajemukan Etnis di Jawa Timur. **Laporan Penelitian**. Surabaya: Bappeprov Jawa Timur.

Santoso, Thomas.

2002 Kekerasan Politik-Agama: Suatu Studi Konstruksi Sosial tentang Perusakan Gereja di Situbondo, 1996. **Ringkasan Disertasi**. Surabaya: Program Pascasarjana, Universitas Airlangga.

Schwarz, Adam.

1994 **A Nation in Waiting. Indonesia in the 1990s**. St. Leonards: Allen & Unwin Pty.

Setiono, Benny G.

2002 Etnis Tionghoa adalah Bagian Integral Bangsa Indonesia. **Makalah.** Disampaikan dalam diskusi Perhimpunan Inti di Jakarta. Dapat diakses di [http://arus.kerjabudaya.org/htm/tionghoa/tionghoa/Tionghoa Benny Soetiono.htm](http://arus.kerjabudaya.org/htm/tionghoa/tionghoa/Tionghoa_Benny_Soetiono.htm). tanggal 14 Mei 2005.

Soekadri, Heru.

1996 Partisipasi Pelabuhan Niaga Hujunggaluh dalam Lintasan Jalan Sutera (Suatu Kajian Awal). **Pidato Pengukuhan.** Surabaya: IKIP Surabaya.

Stake, Robert E.

2005 **Qualitative Case Studies. Dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln.** The Sage Handbook of Qualitative Research. 3rd Ed. Thousand Oaks, California: Sage Publications Inc.

Suparlan, Parsudi,

2003 Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia. **Antropologi Indonesia** No. 71/Tahun XXVII.

Suryadinata, Leo.

2003 Kebijakan Negara Indonesia terhadap etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?" **Antropologi Indonesia.** No. 71/Tahun XXVII..

Tambiah, Stanley J.

1994 "The Politics of Ethnicity." in Robert Borofsksy. **Assessing Cultural Anthropology.** New York: McGraw-Hill.

Tan, Mely G.

1976 Masalah Mayoritas-Minoritas di Indonesia. **Prisma.** No. 8/Tahun V.

Tjandrasmita, Uka.

2000 **Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia.** Kudus: Menara Kudus.

Yin, Robert K.

2003 **Studi Kasus (Desain dan Metode)**. Diterjemahkan oleh M. Djauzi Mutzakir. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yunidha, Sean.

2007 Fenomena Gaya Hidup Mahasiswa Etnis Tionghoa di Universitas Surabaya (Ubaya). **Skripsi**. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.